



RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU KABUPATEN DEMAK



2025

RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU **KABUPATEN DEMAK** TAHUN 2025

TIM PENYUSUN:

Akhmad Solihin
Retia Revany
Robba Fahrissy Darus
Andy Afandy
Yoppie Christian

TIM TATA LETAK:

Herdinar Novalia Junaika
Cindy Syaza Fhadilla

disusun melalui kerja sama antara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Rencana Pengelolaan Pesisir	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN	7
2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional	7
2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah	8
2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Kabupaten Demak	10
BAB III TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU	17
3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	17
3.1.1. Isu Strategi pada Aspek Geografi dan Demografi	17
3.1.2. Isu Strategi pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	21
3.1.3. Isu Strategis pada Aspek Daya Saing Daerah	23
3.1.4. Isu Strategis pada Aspek Kualitas Pelayanan Publik	27
3.2. Pemetaan Isu Permasalahan	28
3.2.1. Tantangan Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Demak	28
3.2.2. Tantangan Infrastruktur serta Sanitasi di Kawasan Pesisir Kabupaten Demak.	34
3.2.3. Permasalahan dan Solusi Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Demak	42
3.3. Penilaian berdasarkan State of the Coast (SOC)	47
BAB IV KELEMBAGAAN	73
BAB V STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN	79
5.1. Sintesis Isu Strategis	79
5.1.1. Sumber daya Alam dan Lingkungan	79

5.1.2. Infrastruktur dan Sanitasi	80
5.1.3. Sosial Ekonomi	81
5.2. Rencana Kegiatan	84
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	101
6.1. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi	101
6.2. Komponen Pemantauan dan Evaluasi	102
6.3. Rencana Pemantauan dan Evaluasi Per Tujuan	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keselarasan misi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional	12
Gambar 2 Kawasan terdampak banjir dan rob Pesisir Demak	19
Gambar 3 Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak	30
Gambar 4 Isu prioritas bidang isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak berdasarkan LFA	32
Gambar 5 Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak	37
Gambar 6 Isu prioritas bidang isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak berdasarkan LFA.....	40
Gambar 7 Peta sosial ekonomi Kabupaten Demak	42
Gambar 8 Isu prioritas bidang sosial ekonomi Kabupaten Demak berdasarkan LFA	44
Gambar 9 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Demak.....	49
Gambar 10 Diagram radar posisi antar elemen pembangunan berkelanjutan Kabupaten Demak	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan antara tujuan RTRW	15
Tabel 2 Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan ekologi Kabupaten Demak..	30
Tabel 3 Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak	38
Tabel 4 Skala prioritas isu sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Demak	42
Tabel 5 Matriks rangkuman temuan kunci SOC dan rekomendasi.....	53
Tabel 6 Matriks isu strategis SoC, RPJPD Kab. Demak, dan RPJMD Kab Demak ..	69
Tabel 7 Rancangan struktur tim koordinasi pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Demak	73
Tabel 8 Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Kab. Demak	83
Tabel 9 Isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak.....	86
Tabel 10 Isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak	90
Tabel 11 Isu sosial ekonomi Kabupaten Demak.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Demak secara geografis memiliki karakteristik wilayah pesisir yang sangat strategis namun sekaligus rentan terhadap dinamika alam dan perubahan iklim global. Sebagai daerah yang terletak di koridor ekonomi Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, wilayah pesisir Demak menjadi tumpuan bagi sektor perikanan kelautan dan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama mayoritas penduduk setempat. Namun, posisi geografis yang relatif datar dengan elevasi rendah menjadikan kawasan ini sangat sensitif terhadap fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah (*land subsidence*).

Kondisi ekosistem pesisir di Kabupaten Demak saat ini menghadapi tantangan serius berupa bencana banjir rob yang terjadi secara persisten dan meluas. Fenomena ini tidak lagi sekadar menjadi gangguan musiman, melainkan telah menjadi hambatan struktural yang mendegradasi kualitas lingkungan dan infrastruktur publik. Tercatat bahwa ruas jalan kabupaten, khususnya jalur Sayung-Morodemak sepanjang 17 kilometer, secara rutin terendam banjir rob, yang menghambat mobilitas logistik dan aksesibilitas antarkawasan.

Masalah abrasi juga menjadi catatan kritis dalam gambaran umum kondisi daerah, di mana pengikisan garis pantai telah menyebabkan hilangnya lahan produktif dan permukiman warga. Dampak dari bencana rob dan abrasi ini secara langsung memicu munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah pesisir akibat rusaknya aset ekonomi masyarakat. Transformasi lahan dari area produktif menjadi genangan air



permanen telah memaksa perubahan pola hidup dan menurunkan produktivitas sektor primer di kawasan tersebut.

Tingginya risiko bencana di wilayah pesisir juga berdampak signifikan terhadap daya saing investasi di Kabupaten Demak. Dokumen kebijakan ini mengidentifikasi bahwa minat investor untuk mengembangkan kawasan industri di pesisir cenderung menurun akibat kerentanan terhadap banjir dan rob. Hal ini menjadi paradoks, mengingat arah pengembangan daerah yang mulai bergeser ke sektor industri guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, namun terkendala oleh faktor daya dukung lahan yang semakin menurun.

Dari aspek hidrologi, wilayah pesisir Demak juga mengalami krisis air baku yang kronis akibat intrusi air laut ke dalam sistem air tanah. Meskipun daerah ini dilewati oleh 12 aliran sungai besar, kualitas air tanah dangkal maupun dalam di banyak titik sudah tidak memenuhi syarat kesehatan untuk dikonsumsi karena tingginya kandungan besi dan salinitas. Keterbatasan sumber air bersih ini menambah beban sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir yang harus mengalokasikan pengeluaran lebih untuk pemenuhan kebutuhan air minum.

Dalam perspektif jangka panjang 2025-2045, pemulihan dan perlindungan kawasan pesisir menjadi isu strategis yang menentukan keberlanjutan pembangunan daerah. Evaluasi atas capaian pembangunan periode sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung positif, ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan, terutama bagi pekerja musiman di sektor kelautan yang sangat rentan terhadap cuaca ekstrem. Transformasi ekonomi yang direncanakan harus mampu menjawab kerentanan masyarakat pesisir melalui diversifikasi mata pencaharian dan penguatan mitigasi bencana.



Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Demak telah menginisiasi pendekatan *Integrated Coastal Management* (ICM) sebagai landasan utama pengelolaan pesisir. ICM mengedepankan sinergi antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan dalam merancang strategi konservasi dan pemanfaatan yang seimbang. Strategi adaptif dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak: pembangunan proteksi pantai (tanggul laut atau struktur hibrid vegetasi dan teknik), rehabilitasi mangrove skala luas, serta pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian dan penguatan kapasitas. Semua intervensi harus didasari tata ruang pesisir yang kuat dan penegakan regulasi yang konsisten agar manfaat pesisir Demak dapat diraih tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, pembangunan pesisir tidak hanya berfokus pada rehabilitasi fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial yang menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dokumen ini berupaya mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka adaptif berbasis bukti untuk mewujudkan pesisir Demak yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Rencana Pengelolaan Pesisir

Tujuan fundamental dari penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Demak adalah untuk menyediakan kerangka kerja fasilitatif yang sistematis dan inklusif untuk mensintesis serta mengkoordinasikan isu, program, maupun inisiatif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, pembangunan pesisir dapat diarahkan secara lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menambah rencana strategis yang sudah ada, melainkan berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang

memetakan, mensinergikan, dan memastikan program-program eksisting berorientasi pada efikasi dalam menjawab permasalahan pesisir yang krusial.

Secara lebih rinci, rencana pengelolaan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi isu strategis: bertindak sebagai instrumen kajian komprehensif untuk memetakan kondisi eksisting dan mengidentifikasi isu-isu kritis, termasuk tantangan degradasi ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim serta bencana pesisir terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, seperti nelayan kecil, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
2. Menginventarisasi program lintas sektor: mengompilasi dan memetakan program pembangunan pesisir dari setiap OPD guna mengidentifikasi keterhubungan, duplikasi, dan kesenjangan (*gap*) dalam perencanaan dan implementasi sekaligus menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan telah diintegrasikan dalam masing-masing program.
3. Mensinergikan dan mengoordinasikan program: mengintegrasikan program-program yang tersebar di berbagai instansi ke dalam kerangka kerja yang utuh, sehingga dapat tercipta efisiensi alokasi sumber daya, konsistensi kebijakan, dan peningkatan dampak nyata bagi masyarakat pesisir tanpa meninggalkan siapa pun (*leave no one behind*).
4. Menjadi landasan usulan program: menyediakan dasar ilmiah untuk merumuskan usulan program baru yang relevan dengan berbasis data, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat, terutama untuk mengatasi isu-isu strategis yang belum terakomodasi dalam rencana atau program OPD yang ada.

5. Menjamin koordinasi lintas sektor dan level: berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang memastikan program pembangunan pesisir selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, serta konsisten dengan dokumen perencanaan daerah lainnya (misalnya, RPJMD dan RTRW) dengan tetap menegakkan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional

Di tingkat nasional, arah kebijakan pengelolaan pesisir Kabupaten Demak selaras dengan beberapa dokumen perencanaan utama:

- RPJPN 2025–2045 (Visi Indonesia Emas 2045) menempatkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru sebagai salah satu pilar penting untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan pesisir Demak dapat berkontribusi terhadap penguatan sektor perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengembangan pariwisata bahari berbasis komunitas yang ramah lingkungan. Dengan kata lain, Demak dapat menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung visi Indonesia Emas yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas.
- RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen teknokratis pembangunan nasional lima tahunan menekankan agenda penguatan ketahanan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Arah ini sangat relevan dengan kondisi Demak, yang menghadapi ancaman nyata berupa abrasi, banjir rob, degradasi mangrove, serta tekanan terhadap ekosistem laut. Program rehabilitasi pesisir, penguatan sistem peringatan dini bencana, serta diversifikasi ekonomi pesisir yang ramah lingkungan menjadi bentuk kontribusi Demak terhadap pencapaian agenda RPJMN.
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir Demak,

khususnya pada Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Berbagai inisiatif seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian pencemaran laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (SDG 5) juga menjadi aspek penting, mengingat kelompok perempuan, orang muda, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di pesisir sering berada dalam posisi rentan terhadap akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan sumber daya. Implementasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial tersebut juga akan mendukung pencapaian SDG 1 mengenai pengentasan kemiskinan dan SDG2 untuk mewujudkan dunia tanpa kelaparan.

- Agenda *Net Zero Emission* 2060 dan pembangunan rendah karbon nasional juga terkait erat dengan potensi ekosistem pesisir Demak. Mangrove, merupakan penyerap karbon alami (*blue carbon*) yang perannya sangat signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan pesisir Demak yang selaras dengan agenda ini dapat membuka peluang pembiayaan inovatif, seperti perdagangan karbon biru atau skema pembayaran jasa ekosistem, yang mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat provinsi, arah kebijakan pesisir Demak juga selaras dengan dokumen perencanaan Jawa Tengah:



- RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi pembangunan *"Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan"*. Dalam visi tersebut, aspek kelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas. Pengelolaan pesisir Demak berkontribusi melalui program-program yang memperkuat ketahanan nelayan, mengurangi kerentanan abrasi, serta mengembangkan sektor perikanan dan wisata bahari yang berdaya saing. Dengan posisi geografisnya di pesisir utara Jawa, Demak menjadi salah satu daerah penting dalam mendukung program provinsi untuk penguatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. RTRW menjadi dasar bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan di masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Demak adalah mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan matriks indikasi program utama Kabupaten Demak.

Kerangka kerja perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang di Kabupaten Demak saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak periode 2011-2031.

Berdasarkan pembaruan kebijakan tersebut, visi penataan ruang daerah diarahkan untuk mewujudkan wilayah yang bertumpu pada keunggulan sektor pertanian dan industri, dengan dukungan strategis dari sektor perdagangan, jasa, serta pariwisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

- Program Strategis Provinsi, seperti *Jateng Green* dan *Jateng Resilience* serta *Mageri Segoro*, menekankan transisi menuju pembangunan hijau dan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Arah kebijakan ini dapat diimplementasikan di Demak melalui upaya rehabilitasi mangrove untuk mengurangi risiko abrasi, pengembangan energi ramah lingkungan di kawasan pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
- *State of the Coast* Provinsi Jawa Tengah, berfungsi sebagai landasan diagnostik yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek tata kelola dan kondisi lingkungan. Dokumen ini menghasilkan output lanjutan baik dalam kerangka manajemen pengetahuan maupun penentuan aksi- aksi yang bersifat operasional yang akan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan pesisir maupun *stakeholder* terkait lainnya.

2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Kabupaten Demak

Arah kebijakan Pembangunan pengelolaan pesisir Kabupaten Demak selaras dengan RPJPD Kabupaten Demak 2025-2045, dengan mengusung visi "**Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**". Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang terukur. RPJMD ini menjadi landasan sinergi antara perencanaan kabupaten, provinsi, dan nasional, serta menjamin efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan berdasarkan indikator kinerja utama serta kebutuhan masyarakat secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian pelaksanaan RPJPD pada tahap I. Sesuai yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Demak, pada tahap I pembangunan Kabupaten Demak memiliki tema pembangunan, **“Penguatan Fondasi Transformasi”**

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah, pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Demak diarahkan melalui enam pilar strategis Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi. Setiap pilar menerjemahkan misi-misi umum RPJMD ke dalam aksi nyata yang relevan dengan tantangan dan potensi unik di wilayah pesisir, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing (Gambar 1).



Sumber: Perda No. 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Demak 2025-2029

Gambar 1 Keselarasan misi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Misi ini dilaksanakan terutama untuk mewujudkan pokok visi “Semakin Bermartabat”. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing dimaknai dengan kualitas yang sehat, cerdas, produktivitas tinggi, dan berwawasan luas. Sumber daya manusia yang berakhlak diwujudkan melalui pembangunan kualitas karakter manusia yang religius dan berbudaya.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Perwujudan masyarakat yang “Semakin Bermartabat” diupayakan pula melalui keteladanan kepemimpinan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas akan melahirkan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Pokok visi “Semakin Maju” yang ditandai dengan peningkatan daya saing daerah, tidak terlepas dari peningkatan daya saing ekonomi. Dalam menguatkan perekonomian daerah, perlu didorong pemanfaatan potensi-potensi lokal sebagai motor penggerak perekonomian. Potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata perlu diberikan dukungan teknologi, sarana produksi dan peningkatan kualitas sumber

daya manusia pengelolanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya harus tetap menjaga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

“Semakin Maju” dalam hal perekonomian harus ditopang dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Kemajuan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Demak tanpa ada yang tertinggal. Akses terhadap infrastruktur berkualitas tidak hanya bermakna merata secara kewilayahan tetapi juga merata secara kelas sosial dan ekonomi.

MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pokok visi “Semakin Sejahtera”, diperlukan penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Ketahanan sosial mencakup perlindungan kesejahteraan sosial terutama kepada golongan marjinal, ketahanan pangan, ketahanan keluarga dan kemandirian desa. Sejahtera harus dapat dinikmati dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan. Keamanan lingkungan diperoleh dengan menjaga kekondusifan wilayah, menjaga nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Lingkungan yang nyaman, layak, dan berkelanjutan diperoleh dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Pedoman perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang di Kabupaten Demak saat ini juga selaras dan mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perubahan atas regulasi tahun 2011, yang secara spesifik bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah berbasis keunggulan sektor pertanian dan industri dengan sokongan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berkelanjutan. Terdapat pergeseran arah kebijakan yang signifikan dibandingkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011; jika sebelumnya fokus utama pengembangan wilayah bertumpu pada sinergi sektor pertanian dan perikanan, maka dalam ketentuan terbaru, orientasi strategis dialihkan pada sektor pertanian dan industri sebagai pilar fundamental pembangunan daerah. Dengan demikian, sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata kini diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam struktur penataan ruang wilayah Kabupaten Demak untuk periode hingga tahun 2031.

Terdapat pergeseran orientasi pembangunan yang signifikan jika membandingkan kedua regulasi tersebut. Pada kebijakan sebelumnya (Perda No. 6 Tahun 2011), fokus utama pengembangan wilayah ditekankan pada integrasi sektor pertanian dan perikanan. Namun, dalam amanat Perda Nomor 1 Tahun 2020, terjadi reposisi strategis di mana sektor pertanian kini dipadukan dengan sektor industri sebagai pilar utama pembangunan daerah. Sementara itu, sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat struktur ekonomi wilayah tersebut. Dengan demikian, sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata kini diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam struktur penataan ruang wilayah Kabupaten Demak untuk periode hingga tahun 2031.



Tabel 1 Perbandingan antara tujuan RTRW

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RANCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031
TUJUAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan



BAB III

TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam upaya melakukan sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penanggulangan bencana di kawasan pesisir menjadi isu krusial yang harus diakomodasi ke dalam misi maupun program prioritas pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan wilayah pesisir dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor lainnya. Melalui proses identifikasi yang komprehensif terhadap berbagai dinamika isu di tingkat global, nasional, maupun regional, serta dengan mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan amanat RTRW, telah dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Demak untuk periode dua dekade mendatang. Isu strategis tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat pilar utama pembangunan daerah sebagai berikut:

3.1.1. Isu Strategi pada Aspek Geografi dan Demografi

Penetapan isu strategis pada aspek geografi dan demografi menjadi landasan krusial dalam merumuskan kebijakan dan langkah mitigasi yang presisi terhadap potensi dampak keruangan maupun kependudukan. Dalam dimensi geografi, fokus perhatian diarahkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan aksesibilitas serta mutu infrastruktur, hingga optimalisasi tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, pada dimensi demografi, analisis dipusatkan pada pola pertumbuhan dan distribusi penduduk serta dinamika transisi struktur kependudukan di wilayah tersebut. Penjelasan mengenai isu-isu strategis

yang **mengintegrasikan dan berfokus kepada kawasan pesisir di Kabupaten Demak** dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemulihan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

"Kabupaten Demak menghadapi tantangan struktural dalam pemenuhan kebutuhan air baku dikarenakan ketiadaan sumber mata air alami di wilayah tersebut. Ketergantungan terhadap pasokan air sangat terfokus pada aliran yang bersumber dari Waduk Kedungombo dan Rawapening, serta pemanfaatan air tanah. Namun, kedua sumber ini memiliki kendala operasional yang signifikan; ketersediaan air sungai sangat bergantung pada regulasi pembagian debit dari Waduk Kedungombo yang seringkali menyebabkan defisit air pada musim kemarau. Di sisi lain, pemanfaatan air tanah dibatasi secara ketat oleh regulasi konservasi, di mana Kecamatan Sayung dan Karangtengah telah ditetapkan sebagai zona merah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri di wilayah tersebut terhadap pasokan air kontinu dengan keterbatasan akses infrastruktur air perpipaan.

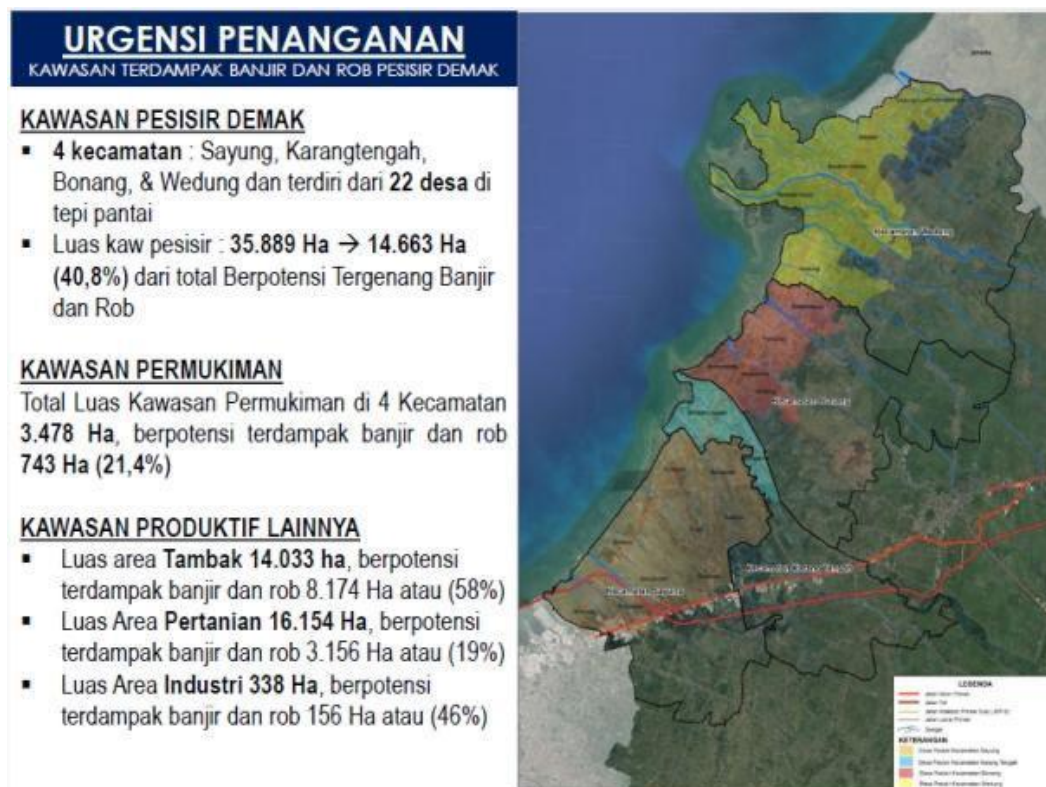
Dari aspek kualitas, meskipun Indeks Kualitas Air Kabupaten Demak saat ini berada pada kategori baik (72,77), risiko degradasi mutu air akibat limbah di badan air tetap menjadi ancaman serius. Air baku yang tersedia masih memerlukan proses pengolahan intensif untuk mencapai standar air bersih, mengingat layanan air perpipaan yang ada saat ini belum mencapai standar kualitas air siap minum (ASUM)."

b. Bencana Rob dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kondisi hidrologi Kabupaten Demak yang dilalui oleh sejumlah aliran sungai besar menjadi faktor kontributor signifikan terhadap risiko bencana banjir di wilayah tersebut. Secara geomorfologis, sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan kawasan cekungan eks-rawa dengan karakteristik tanah aluvial berlumpur yang memiliki daya dukung rendah. Tantangan



pembangunan paling krusial adalah fenomena banjir rob (*tidal flood*) yang bersifat mendesak, mengingat topografi wilayah yang landai dengan elevasi rendah di sepanjang garis pantai meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan muka air laut global. Ekskalasi bencana rob ini secara sistemik merusak infrastruktur strategis, mulai dari jaringan jalan hingga kawasan permukiman, serta mengakibatkan degradasi lahan produktif di sektor pertanian dan perikanan. Selain memicu hambatan logistik di jalur utama Pantura, ketiadaan langkah mitigasi yang komprehensif berpotensi menyebabkan hilangnya wilayah daratan secara permanen di beberapa kecamatan pesisir Kabupaten Demak.



Gambar 2 Kawasan terdampak banjir dan rob Pesisir Demak

Isu terkait kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir Kabupaten Demak merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, menjadi tujuan utama dari dalam target pengelolaan ini adalah untuk menjaga,

memulihkan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan pesisir sebagai habitat produktif, penyangga kehidupan dan pelindung alami terhadap bencana. Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan seperti konversi lahan mangrove, pencemaran perairan, dan degradasi tambak ini berdampak langsung pada penurunan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Dampak tersebut makin nyata dengan frekuensi, yang ditandai dengan bencana hidrometeorologi yang meningkat seperti banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman, infrastruktur serta sumber penghidupan utama masyarakat nelayan dan petambak.

c. Kemandirian pangan menuju hilirisasi industri yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan kemandirian pangan di wilayah pesisir Kabupaten Demak menghadapi tantangan kompleks akibat degradasi lahan produktif pasca bencana banjir rob dan abrasi. Guna memastikan ketahanan pangan masyarakat, diperlukan strategi peningkatan produksi melalui rehabilitasi lahan terdampak, diversifikasi komoditas yang adaptif terhadap salinitas tinggi, serta penerapan teknologi perikanan yang tepat guna. Kepastian ketersediaan pangan bagi penduduk pesisir menjadi prakondisi utama bagi keberhasilan program intensifikasi pangan daerah.

Dalam kerangka ini, pengembangan teknologi pengolahan hasil pangan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, baik menjadi produk setengah jadi maupun produk industri jadi yang bernilai tambah tinggi guna memperluas akses pasar. Lebih lanjut, isu kemandirian pangan di kawasan pesisir harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir. Transformasi ini dilakukan melalui hilirisasi industri hasil pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal sekaligus menjamin kelestarian sumber daya alam dalam jangka panjang.



3.1.2. Isu Strategi pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara fundamental dipresentasikan melalui kemudahan akses terhadap sumber daya produktif dan pemenuhan layanan dasar yang berkualitas. Isu strategis dalam dimensi kesejahteraan ini mencakup indikator kualitas hidup, indeks kebahagiaan, perwujudan keadilan sosial, serta jaminan inklusivitas dalam mengakses sarana pengembangan diri. Guna mengakselerasi pencapaian kondisi sosial-ekonomi yang ideal, diperlukan telaah mendalam terhadap isu-isu krusial yang memengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin berikut:

a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja

Pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Demak difokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata, terutama dalam menghadapi tantangan geografis yang spesifik. Tingkat kemiskinan tetap menjadi indikator krusial sekaligus isu prioritas yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya yang sistemik terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nelayan serta warga pesisir. Tingginya angka kemiskinan di area ini sering kali menjadi akar dari berbagai masalah turunan, termasuk fluktuasi angka pengangguran yang dipicu oleh ketergantungan pada sektor kelautan yang tidak menentu.

Upaya penanggulangan pengangguran di pesisir Demak sangat bergantung pada penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi di sektor perikanan, pengolahan hasil laut, maupun pariwisata bahari. Namun, ketersediaan lapangan kerja ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat. Masyarakat pesisir perlu dibekali dengan keterampilan teknis dan pengetahuan modern agar mereka mampu mengakses peluang ekonomi yang ada, sehingga investasi yang masuk

benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan penduduk lokal.

b. Kemandirian desa sebagai basis pemberdayaan Masyarakat

Kemandirian desa di kawasan pesisir Demak kini berada pada titik krusial, terutama karena tantangan lingkungan seperti rob yang berdampak pada aksesibilitas pendidikan dan layanan dasar. Kurangnya pelatihan khusus bagi masyarakat nelayan dan petambak dalam mengelola potensi bahari menghambat munculnya inovasi lokal yang mandiri. Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim sering kali menurunkan produktivitas warga. Penguatan kapasitas kader kesehatan serta peningkatan kesadaran akan sanitasi di lingkungan terdampak air pasang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan memastikan masyarakat tetap berdaya di tengah tantangan geografis yang ada.

Sektor ekonomi lokal di pesisir Demak memerlukan akselerasi melalui penguatan usaha mikro berbasis hasil laut dan diversifikasi produk olahan perikanan. Tantangan nyata berupa keterbatasan akses pasar bagi nelayan kecil perlu diatasi dengan pendampingan kelompok usaha dan digitalisasi pemasaran produk lokal. Dukungan ini tidak akan maksimal tanpa perbaikan infrastruktur dasar yang adaptif, seperti peninggian jalan desa dan akses listrik yang stabil untuk mendukung teknologi pengawetan ikan (cold storage). Dengan memperbaiki konektivitas dan memperkuat struktur ekonomi rakyat, desa-desa pesisir di Demak dapat bertransformasi menjadi entitas yang mandiri secara finansial dan tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

c. Transisi Epidemiologi

Kabupaten Demak tengah menghadapi transisi epidemiologi yang kompleks, di mana beban kesehatan bergeser dari penyakit menular ke



penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan jantung, yang diperburuk oleh meningkatnya jumlah populasi lansia serta tantangan spesifik di wilayah pesisir. Di kawasan pesisir, perubahan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat berpadu dengan kerentanan lingkungan akibat perubahan iklim, sehingga menuntut strategi promosi kesehatan dan pencegahan dini yang lebih adaptif untuk menekan angka morbiditas serta mortalitas di masa depan.

3.1.3. Isu Strategis pada Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan di wilayah pesisir Demak menuntut penguatan daya saing yang berfokus pada kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta menarik investasi guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya ini menghadapi tantangan krusial, terutama terkait kerentanan infrastruktur akibat dampak perubahan iklim seperti abrasi dan rob, yang secara langsung memengaruhi akses pendidikan, kesehatan, serta stabilitas ekonomi warga pesisir. Oleh karena itu, perumusan isu strategis Kabupaten Demak harus mengintegrasikan penguatan aspek fundamental tersebut dengan mitigasi lingkungan guna memastikan keberlanjutan daya saing di tengah dinamika wilayah pesisir.

a. Sumber daya manusia yang berakhlak

Pembangunan SDM berakhlak di wilayah pesisir Demak diarahkan pada penguatan karakter masyarakat melalui integrasi nilai moral dan etika yang adaptif terhadap dinamika lokal. Upaya ini menghadapi tantangan nyata seperti belum optimalnya pendidikan karakter, terbatasnya pelatihan bagi pendidik, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang sering ditemui di kawasan pesisir. Di tengah arus globalisasi dan derasnya pertukaran informasi, masyarakat pesisir dituntut memiliki literasi yang kuat agar

mampu menyaring pengaruh luar tanpa mengikis nilai budi pekerti dan kearifan lokal yang menjadi pondasi peradaban mereka.

b. Peningkatan potensi investasi daerah berbasis komoditas unggulan lokal

Peningkatan potensi investasi sangat krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing di wilayah pesisir Demak, namun realisasinya masih terhambat oleh kompleksitas isu lingkungan, terutama kerentanan terhadap **bencana banjir rob**, keterbatasan akses **air baku**, serta alih fungsi **lahan produktif**. Padahal, kawasan ini memiliki kekayaan komoditas unggulan di sektor perikanan, dan pariwisata bahari yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan investasi yang adaptif terhadap tantangan geografis guna mentransformasi potensi lokal tersebut menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

c. Penguatan daya saing wisata yang berbasis kearifan lokal/ budaya, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan daerah

Penguatan daya saing wisata pesisir di Kabupaten Demak diproyeksikan sebagai lokomotif utama yang menggerakkan sektor unggulan lainnya, seperti perikanan tangkap, budidaya tambak, UMKM pengolahan hasil laut, serta industri hijau. Sektor pariwisata tidak hanya berperan sebagai penyumbang PDRB, tetapi juga menjadi stimulator bagi ekosistem ekonomi pesisir yang lebih tangguh. Selain mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak yang ikonik, wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata mangrove dan wisata bahari yang kaya akan kearifan lokal masyarakat pantai, sehingga menawarkan diversitas destinasi bagi para pelancong.

Meskipun memiliki modal sejarah dan alam yang kuat, optimalisasi pariwisata di pesisir Demak masih menghadapi tantangan



nyata terkait keterbatasan promosi dan infrastruktur pendukung yang adaptif terhadap isu lingkungan seperti rob. Dibutuhkan strategi pemasaran yang lebih efektif serta manajemen destinasi yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut. Saat ini, fokus pengembangan ekonomi kreatif di Demak bertumpu pada subsektor kriya, seni pertunjukan, dan seni rupa; penguatan pola pengembangan ketiga sektor ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi pariwisata pesisir dan meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional.

d. Penataan Wilayah dan Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam upaya menata wilayah pesisir Demak dan menyediakan infrastruktur aksesibilitas yang berkelanjutan, tantangan utama terletak pada ketimpangan layanan publik bagi masyarakat terdampak abrasi dan rob. Pembangunan infrastruktur saat ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta perempuan di pelosok desa pesisir, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan penataan wilayah tidak meminggirkan mereka yang paling terdampak perubahan iklim. Selain itu, masih maraknya bangunan yang menyalahi Tata Ruang, seperti permukiman di sempadan pantai atau area konservasi mangrove, mencerminkan rendahnya kesadaran kolektif dan belum optimalnya penegakan aturan yang ada.

Pelanggaran tata ruang ini akan memperparah degradasi lingkungan dan mempercepat laju tenggelamnya daratan di pesisir Demak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penataan wilayah harus mampu mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti optimalisasi

sektor perikanan dan ekowisata bahari. Melalui pengembangan ekonomi lokal yang terencana, diharapkan ketimpangan antarwilayah dapat ditekan sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan inklusivitas bagi seluruh warga Demak, baik di wilayah daratan maupun pesisir.

e. Penciptaan dan Pemanfaatan Teknologi

Masa depan sektor perikanan di wilayah pesisir Demak sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengintegrasikan teknologi modern di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar. Pesatnya perkembangan teknologi, mulai dari sistem pemantauan laut berbasis AI hingga otomatisasi pengolahan hasil laut, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan. Namun, pemanfaatan ini memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap keamanan data operasional dan keberlanjutan ekosistem digital. Tanpa perhatian optimal pada aspek-aspek tersebut, potensi teknologi untuk memodernisasi ekonomi pesisir Demak justru bisa terhambat oleh risiko siber yang membahayakan privasi dan rantai pasok industri lokal.

Keberhasilan transformasi digital di pesisir Demak terletak pada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembentukan ekosistem inovasi yang kolaboratif. Masyarakat pesisir tidak hanya dituntut menguasai alat teknis seperti platform analisis data tangkapan, tetapi juga harus memiliki pemikiran kritis dan etika yang kuat untuk menciptakan daya saing yang unggul. Hal ini harus didukung oleh sinergi antara pemerintah, akademisi, dan investor dalam sebuah ekosistem riset yang berani mengambil risiko demi menemukan solusi inovatif bagi permasalahan pesisir. Melalui budaya inovasi yang terbuka dan toleransi terhadap proses eksperimen, Demak dapat membangun



iklim industri perikanan yang kondusif, efisien, dan memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi.

3.1.4. Isu Strategis pada Aspek Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan fondasi krusial bagi pembangunan di wilayah pesisir Demak, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat yang menghadapi tantangan lingkungan unik seperti rob dan abrasi. Pelayanan yang responsif dan berkualitas tidak hanya menjadi muara kebijakan, tetapi juga kunci dalam membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah. Dengan terciptanya layanan yang prima, akan terbangun iklim daerah yang kondusif, kolaboratif, dan sinergis, yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat resiliensi masyarakat pesisir dalam mencapai kesejahteraan bersama.

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Dinamis

Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola yang responsif dan adaptif, terutama dalam menghadapi dinamika ekosistem pesisir yang kian menantang. Di tengah ancaman banjir rob dan perubahan garis pantai, peningkatan kapasitas lembaga menjadi sangat krusial agar birokrasi lebih fleksibel dalam menangani kebutuhan darurat masyarakat serta lebih efektif dalam berkomunikasi. Fokus utama terletak pada penguatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas, yang didukung oleh integrasi teknologi informasi untuk mempercepat akses layanan dan efisiensi administrasi di seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang memiliki aksesibilitas sulit di area pesisir.

Partisipasi aktif masyarakat nelayan dan penduduk pesisir dalam pengambilan keputusan menjadi pilar penting agar program pembangunan selaras dengan aspirasi nyata di lapangan. Melalui ruang perencanaan yang inklusif, harapan warga terkait mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi

lokal dapat terakomodasi dalam agenda jangka panjang daerah. Urgensi ini selaras dengan arah pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, memastikan bahwa isu strategis pesisir Demak terintegrasi secara utuh dalam perencanaan dua puluh tahun ke depan demi mewujudkan ketahanan wilayah yang berkelanjutan.

3.2. Pemetaan Isu Permasalahan

3.2.1. Tantangan Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Demak

Isu utama pengelolaan permasalahan sumber daya pesisir dan lingkungan di Kabupaten Demak berpusat pada fenomena *Land Subsidence* (penurunan permukaan tanah). Penurunan permukaan tanah ini dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, yang merupakan konsekuensi dari perluasan kawasan industri, serta dan alih fungsi lahan, khususnya dari hutan mangrove menjadi area tambak (pertambakan). Selain itu, *Land Subsidence* juga diperparah oleh praktik reklamasi yang tidak berkelanjutan di sepanjang pesisir. Dampak langsung dari penurunan muka tanah *Land Subsidence* sangat luas, menyebabkan abrasi (terkikisnya garis pantai), dan memicu banjir banjir rob atau genangan air laut di daratan. Abrasi tidak hanya disebabkan oleh penurunan muka tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*Sodo/push net*), yang mengganggu struktur dasar laut dan mempercepat erosi pantai. Akibatnya terjadi menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem berupa penyusutan garis pantai, kerusakan ekosistem pesisir, dan penurunan kualitas air bersih yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir.

Kerusakan lingkungan tersebut juga memperparah kerentanan sosial, terutama bagi kelompok nelayan kecil, perempuan dan masyarakat

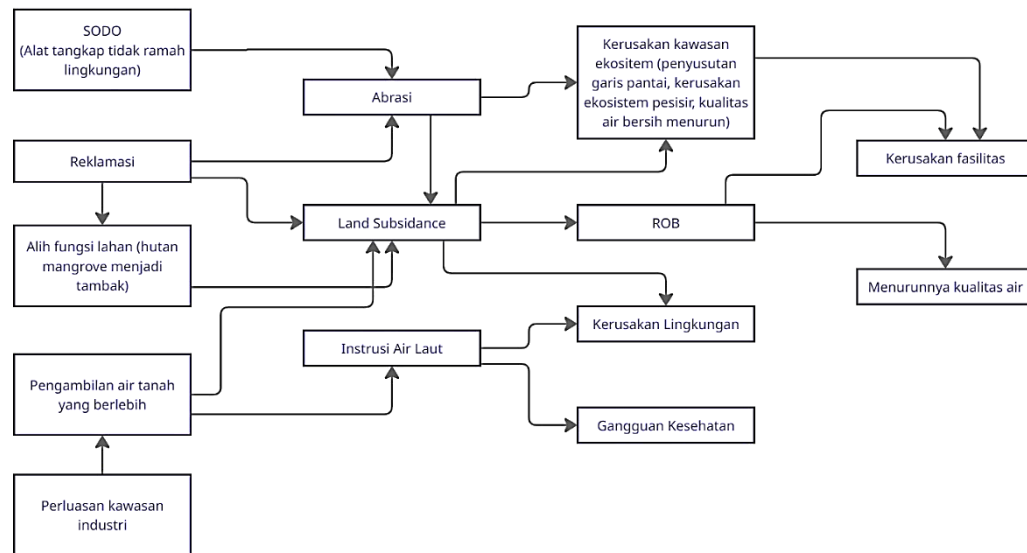


berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah pesisir. Intrusi air laut akibat eksploitasi air tanah telah menurunkan kualitas air bersih dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, menciptakan lingkaran masalah ekologis dan sosial yang saling memperkuat. Dampak ikutan dari masalah *Land Subsidence* semakin memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Rob mengakibatkan kerusakan fasilitas dan menurunnya kualitas air di wilayah tersebut. Selain itu, pengambilan air tanah yang berlebihan secara langsung memicu intrusi air laut (masuknya air laut ke dalam akuifer air tanah tawar), yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut dan menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Secara keseluruhan, keterkaitan antara *Land Subsidence*, intrusi air laut, dan rob menciptakan lingkaran setan masalah lingkungan pesisir di Demak, mengancam ekosistem, infrastruktur, dan kesehatan publik.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang inklusif dan adaptif serta kolaboratif dan penegakan regulasi yang terpadu menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan fungsi ekosistem dan menjamin keberlanjutan wilayah. Pendekatan ini harus menempatkan masyarakat pesisir - khususnya nelayan kecil, perempuan, orang muda - sebagai aktor utama dalam upaya rehabilitasi mangrove, konservasi air tanah, dan penataan ruang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan pesisir Demak tidak hanya berfokus pada mitigasi fisik, tetapi juga memperkuat ketangguhan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*) melalui kolaborasi lintas sektor, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi publik tentang konservasi sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Berikut pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Demak serta perangkingan isu strategis berdasarkan skala prioritas menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA):





Gambar 3 Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak

Sumber: Hasil FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Demak

Tabel 2 Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan ekologi Kabupaten Demak

No	Isu Permasalahan	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
1	Reklamasi	6	0	6	2
2	Abrasi	4	3	7	1
3	Kerusakan ekosistem	2	3	5	2
4	Kerusakan fasilitas	0	2	2	3
5	Alih fungsi lahan	4	1	5	2
6	<i>Land subsidence</i>	6	3	9	1
7	Rob	6	1	7	1
8	Menurunnya kualitas air	0	1	1	3
9	Pengambilan air tanah	4	1	5	2
10	Intrusi air laut	1	2	3	3
11	Kerusakan lingkungan	2	2	4	2
12	Perluasan kawasan industri	2	0	2	3
13	<i>Sodo</i> (push net)	2	0	2	3

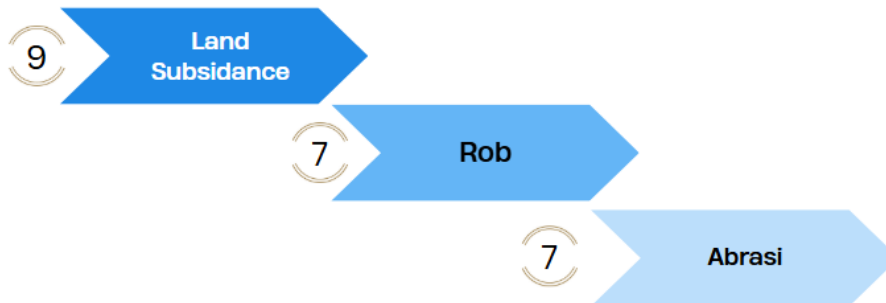
Berdasarkan analisis skala prioritas, isu-isu permasalahan sumber daya pesisir dan lingkungan yang mendesak di Kabupaten Demak dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Isu dengan Peringkat 1

merepresentasikan masalah-masalah paling krusial yang memerlukan penanganan segera. Dalam kategori ini terdapat tiga isu dengan total nilai tertinggi: *Land Subsidence* (Nilai 9), Abrasi (Nilai 7), dan Rob (Nilai 7). *Land Subsidence* atau penurunan permukaan tanah menjadi masalah utama karena memiliki nilai tertinggi, menunjukkan bahwa ia dianggap sebagai penyebab (Penyebab: 6) dan akibat (Akibat: 3) yang sangat signifikan. Sementara itu, Abrasi dan Rob memiliki bobot penyebab yang lebih rendah (Abrasi: 4; Rob: 6) namun dianggap menghasilkan dampak yang serius, menjadikannya prioritas utama untuk mitigasi.

Isu-isu yang masuk dalam Peringkat 2 adalah masalah penting yang berkontribusi besar terhadap kerusakan pesisir, dan meskipun dampaknya tidak se-mendesak Peringkat 1, penanganannya tetap krusial untuk mencegah eskalasi. Isu-isu ini meliputi Reklamasi (Nilai 6), Kerusakan ekosistem (Nilai 5), Alih fungsi lahan (Nilai 5), Pengambilan air tanah (Nilai 5), dan Kerusakan lingkungan (Nilai 4). Pola di Peringkat 2 menunjukkan bahwa isu-isu ini sering bertindak sebagai akar permasalahan yang memicu Peringkat 1. Contohnya, Alih fungsi lahan (Penyebab: 4) dan Pengambilan air tanah (Penyebab: 4) adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap *Land Subsidence*, sedangkan Reklamasi (Penyebab: 6) memiliki peran besar sebagai pemicu berbagai masalah lingkungan.

Terakhir, isu-isu dengan Peringkat 3 adalah faktor pendukung atau konsekuensi sekunder yang dampaknya tidak setinggi dua peringkat di atasnya, namun tetap harus diperhatikan dalam kerangka solusi komprehensif. Isu-isu ini mencakup Kerusakan fasilitas (Nilai 2), Menurunnya kualitas air (Nilai 1), Intrusi air laut (Nilai 3), Perluasan kawasan industri (Nilai 2), dan *sodo* (push net) (Nilai 2). Isu-isu ini cenderung menjadi akibat (misalnya Menurunnya kualitas air: Akibat 1) atau memiliki bobot penyebab yang lebih rendah, seperti Perluasan kawasan industri (Penyebab:

2) yang memicu pengambilan air tanah, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan *sodo* (push net) (Penyebab: 2) yang berkontribusi terhadap abrasi. Dengan demikian, strategi penanganan harus difokuskan pada Peringkat 1 dan 2 untuk menyelesaikan akar masalah lingkungan pesisir di Demak secara efektif.



Gambar 4 Isu prioritas bidang isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak berdasarkan LFA

Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Penurunan muka tanah di wilayah pesisir Kabupaten Demak merupakan isu permasalahan paling mendesak yang secara langsung meningkatkan risiko bencana lingkungan di Kabupaten Demak. Faktor utama penyebab fenomena ini terjadi akibat eksploitasi adalah pengambilan air tanah secara berlebihan, baik oleh masyarakat maupun dalam skala lebih signifikan oleh aktivitas industri di kawasan industri yang berkembang di wilayah pesisir seperti Kecamatan Sayung. Selain itu, beban bangunan yang tidak terkendali serta kondisi geologis Demak yang didominasi batuan aluvium atau endapan sedimen lumpur yang masih muda, menjadikan wilayah ini secara alami rentan terhadap kompaksi. Dampak dari penurunan tanah ini sangat parah, yaitu menjadi pemicu utama sekaligus dan memperparah intensitas banjir rob dan abrasi. Penurunan tanah telah menyebabkan sebagian wilayah pesisir - elevasi

daratan di pesisir Demak, bahkan hingga puluhan ribu hektar berada di bawah permukaan laut, meningkatkan risiko tenggelamnya wilayah secara permanen dalam beberapa dekade mendatang jika tidak segera diatasi.

Rob (Banjir Pasang Air Laut)

Rob (banjir pasang air laut) merupakan dampak langsung yang paling dirasakan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Demak. Penyebab utama rob di Demak adalah kombinasi antara kenaikan muka air laut secara alami dan dampak penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang mengakibatkan turunnya elevasi dan mengurangi ketinggian daratan. Selain itu, sebagian kajian ilmiah juga menyebutkan bahwa konversi lahan, khususnya perusakan hutan mangrove menjadi tambak telah menghilangkan fungsi alami ekosistem pesisir sebagai benteng alami yang seharusnya berfungsi sebagai penahan gelombang dan penyangga alami terhadap banjir pasang (rob). Dampak dari rob ini sangat luas dan kompleks - mulai dari merusak, menyebabkan genangan permanen di permukiman dan lahan pertanian, hingga kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Desa Bedono dan Morosari di Kecamatan Sayung, warga harus meninggikan rumah berkali-kali atau bahkan melakukan relokasi karena genangan air laut yang terus meluas. Selain itu rob juga merusak infrastruktur, fasilitas umum, dan menyebarkan limbah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan, pencemaran akibat limpasan limbah, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petambak kecil.

Abrasi (Pengikisan Pantai)

Abrasi merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan wilayah pesisir Kabupaten Demak karena mengakibatkan penyusutan daratan,



hilangnya permukiman, serta kerusakan ekosistem pesisir. Secara alami, abrasi dipicu oleh faktor oseanografi seperti gelombang dan arus laut yang kuat, terutama saat musim angin barat. Namun, kondisi ini diintensifkan secara signifikan oleh faktor antropogenik. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa penurunan muka tanah turut menjadi penyebab abrasi karena mempercepat masuknya air laut ke daratan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir terdekat, seperti reklamasi di Semarang Utara (Pantai Marina) telah mengubah pola arus laut, dan menciptakan turbulensi yang memperparah pengikisan pantai di kawasan pesisir Sayung. Dampak dari abrasi di Demak bersifat multidimensional, tidak hanya menimbulkan hilangnya daratan hingga ribuan hektar - tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir, khususnya nelayan, petambak kecil dan petani serta memaksa alih fungsi lahan dari sawah dan tambak menjadi perairan terbuka. Hal ini, menyebabkan hilangnya ruang hidup dan ruang produksi, memaksa sebagian warga untuk beradaptasi secara ekstrem atau bahkan berpindah tempat tinggal.

3.2.2. Tantangan Infrastruktur serta Sanitasi di Kawasan Pesisir Kabupaten Demak.

Permasalahan infrastruktur dan sanitasi di kawasan pesisir Kabupaten Demak memiliki keterkaitan yang kompleks dengan dinamika lingkungan dan sosial masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak lingkungan serta kesehatan yang serius. Secara struktural, permasalahan utama dipicu oleh dampak langsung dari bencana pesisir seperti rob dan abrasi, yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pengaman pesisir seperti tanggul, drainase dan sistem pengendali banjir yang memadai. Kondisi ini secara langsung menyebabkan kerusakan pada jalan, dan jembatan serta kerusakan



fasilitas umum, yang pada gilirannya menghambat mobilitas dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, kelemahan dalam masalah juga diperburuk oleh aspek perencanaan tata ruang dan tata kelola pesisir. Belum tersusunnya pemetaan lahan mangrove dan masterplan zonasi dan kawasan pesisir menyebabkan lemahnya pengaturan alih fungsi lahan dan tidak terintegrasinya sistem drainase, yang mengakibatkan kurang lancarnya irigasi dan drainase. Akibatnya, terjadi serta pendangkalan muara sungai dan penurunan fungsi ekosistem pesisir, termasuk kerusakan hutan mangrove yang berperan penting dalam melindungi pesisir dari abrasi dan banjir rob. Kerusakan infrastruktur dan pendangkalan ini pada akhirnya berkontribusi pada kerusakan ekosistem pesisir, seperti kerusakan ekosistem mangrove.

Dari sisi Aspek sanitasi dan lingkungan, terjadi lingkaran permasalahan yang saling terkait. Pengelolaan limbah dan sampah yang kurang optimal, ditambah dengan peningkatan kerusakan perumahan dan permukiman akibat rob, menyebabkan masalah penumpukan sampah di lingkungan padat penduduk. Keterbatasan Lingkungan yang buruk ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap sanitasi layak dan kurangnya akses air bersih yang menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit kulit, demam berdarah, dan masalah kesehatan lainnya.

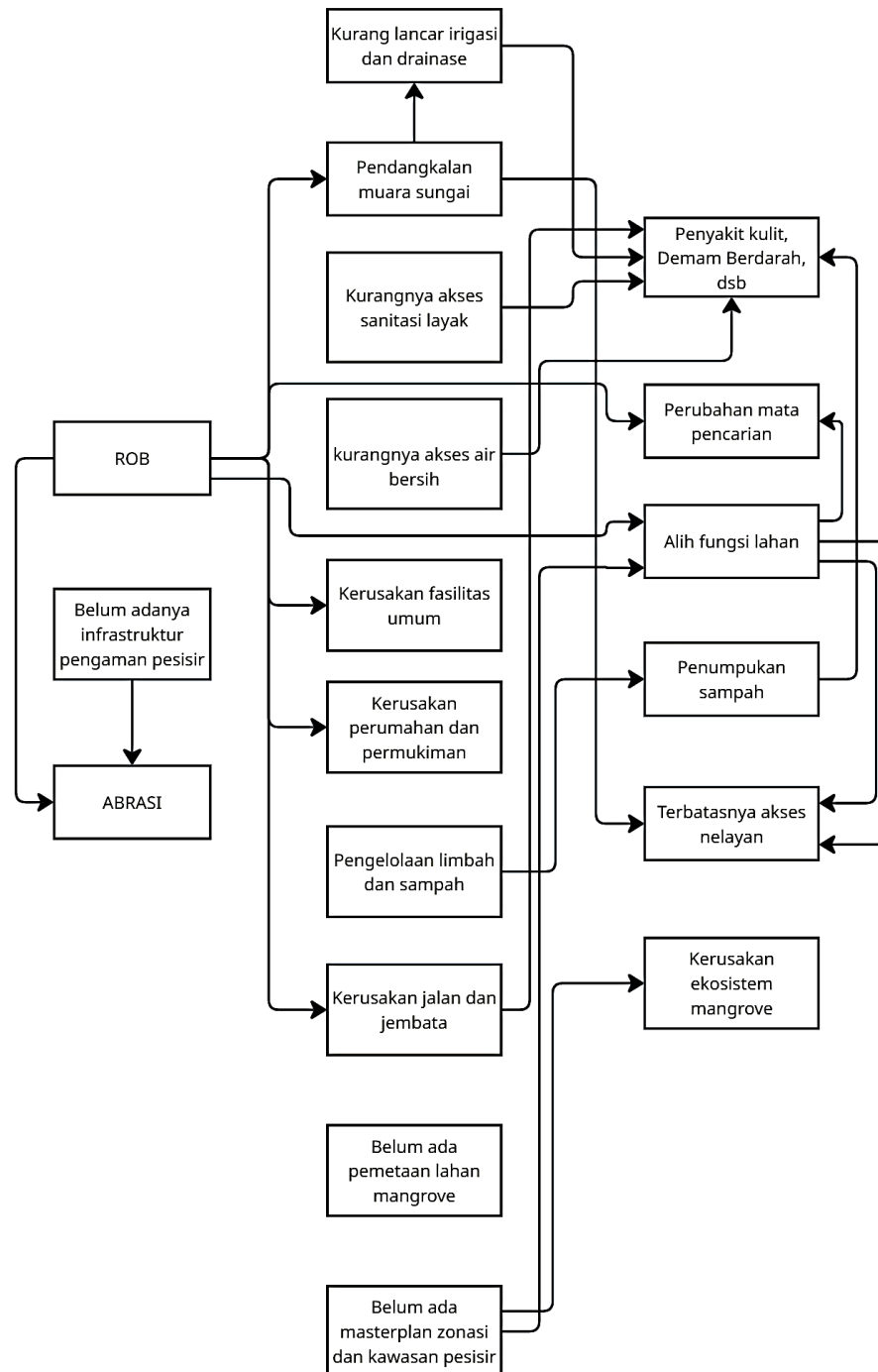
Secara sosial, kombinasi antara kerusakan infrastruktur, masalah sanitasi, dan menurunnya kualitas ekosistem pesisir menyebabkan keterbatasan akses ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Banyak warga terdorong untuk mengubah mata pencaharian atau berpindah tempat tinggal, sedangkan perempuan dan kelompok rentan menghadapi beban ganda akibat menurunnya kondisi lingkungan dan meningkatnya risiko kesehatan keluarga. Keseluruhan isu ini menunjukkan bahwa kelemahan mendasar dalam infrastruktur fisik dan tata kelola sanitasi



menjadi faktor penentu yang memperburuk kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan di Demak.

Pemetaan isu infrastruktur dan sanitasi di kawasan pesisir Kabupaten Demak sangat penting karena wilayah ini menghadapi tantangan kompleks tersebut. Perencanaan tata ruang yang baik menjadi kunci utama dalam mengelola pertumbuhan kawasan pesisir. Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah dapat mengatur zonasi permukiman, kawasan industri, dan area konservasi sehingga dapat mencegah berkembangnya permukiman kumuh dan ilegal. Selain itu, tata ruang yang terencana juga mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk baru tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Demak beserta penilaian/pemeringkatan isu strategis berdasarkan skala prioritas menggunakan *Logical Framework Analysis* dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini.





Gambar 5 Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak

Sumber: Hasil FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten Demak

Tabel 3 Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak

No	Isu Permasalahan	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
1	Rob	12	0	12	1
2	Abrasi	6	2	8	2
3	Belum adanya infrastruktur pengaman pesisir	8	0	8	2
4	Kurang lancar irigasi dan drainase	2	1	3	3
5	Pendangkalan muara sungai	2	2	4	3
6	Kurangnya akses sanitasi layak	2	0	2	3
7	Kurangnya akses air bersih	2	0	2	3
8	Kerusakan fasum	0	3	3	3
9	Kerusakan perumahan dan permukiman	2	3	5	2
10	Pengelolaan limbah dan sampah	4	0	4	3
11	Kerusakan jalan dan jembatan	0	2	2	3
12	Belum ada pemetaan lahan mangrove	4	0	4	3
13	Belum ada masterplan zonasi kawasan pesisir	2	0	2	2
14	Penyakit kulit, DBD, dll	0	5	5	2
15	Perubahan mata pencaharian	0	2	2	3
16	Alih fungsi lahan	4	3	7	2
17	Penumpukan sampah	2	1	3	3
18	Terbatasnya akses nelayan	0	2	2	3
19	Kerusakan ekosistem	2	2	4	3

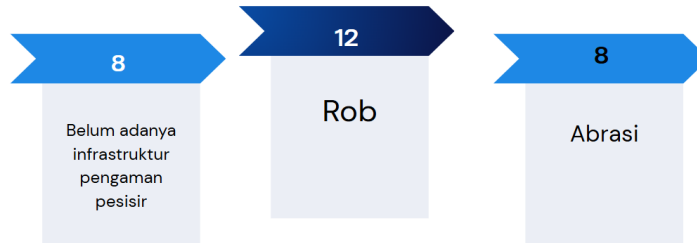
Berdasarkan tabel skala prioritas permasalahan infrastruktur, sanitasi, dan lingkungan di Kabupaten Demak, isu-isu mendesak dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Isu dengan Peringkat 1 adalah masalah paling kritis yang wajib ditangani segera, yaitu Rob (Banjir Pasang Air Laut) dengan nilai tertinggi (12). Nilai 12 ini berasal dari bobot penyebab yang sangat tinggi (12), mengindikasikan bahwa Rob, meskipun ia adalah akibat dari masalah lain seperti *land subsidence*, secara fungsional bertindak

sebagai pemicu utama yang mengakibatkan berbagai kerusakan turunan lainnya dalam sistem infrastruktur dan sanitasi. Prioritas utama ini menegaskan bahwa pengendalian rob adalah kunci untuk meredam permasalahan di level yang lebih rendah.

Isu-isu dalam Peringkat 2 merepresentasikan permasalahan yang memiliki bobot penyebab dan/atau akibat yang signifikan, dan memerlukan penanganan cepat sebagai bagian dari solusi komprehensif. Kategori ini mencakup enam isu: Abrasi (Nilai 8), Belum adanya infrastruktur pengaman pesisir (Nilai 8), Alih fungsi lahan (Nilai 7), Kerusakan perumahan dan pemukiman (Nilai 5), Penyakit kulit, DBD, dll (Nilai 5), dan Belum ada masterplan zonasi kawasan pesisir (Nilai 2). Kelompok ini menunjukkan bahwa kerentanan fisik (Abrasi dan Belum adanya infrastruktur) dan aspek sosial-ekonomi (Alih fungsi lahan dan Kerusakan perumahan) adalah pilar utama masalah. Khususnya, nilai tinggi pada Abrasi (Penyebab 6, Akibat 2) dan Alih fungsi lahan (Penyebab 4, Akibat 3) menunjukkan peran mereka sebagai kontributor signifikan terhadap ketidakstabilan kawasan pesisir.

Isu-isu dengan Peringkat 3 merupakan faktor pendukung, konsekuensi sekunder, atau aspek tata kelola yang dampaknya tidak setinggi dua peringkat di atasnya, namun tetap esensial untuk pembangunan berkelanjutan. Peringkat ini terdiri dari sepuluh masalah, termasuk aspek teknis seperti Pengelolaan limbah dan sampah (Nilai 4) dan Kurang lancar irigasi dan drainase (Nilai 3), hingga dampak sosial seperti Terbatasnya akses nelayan (Nilai 2) dan Perubahan mata pencaharian (Nilai 2). Nilai rendah pada isu-isu sanitasi, seperti Kurangnya akses sanitasi layak (Nilai 2) dan Kurangnya akses air bersih (Nilai 2), tidak berarti masalah ini tidak penting, melainkan mengindikasikan bahwa dampak fatalnya tercermin pada isu Penyakit kulit, DBD, dll di Peringkat 2. Strategi penanganan oleh karena itu harus berfokus pada pengendalian Rob dan

pembangunan infrastruktur pengaman pesisir (Peringkat 1 & 2) sambil memperbaiki tata kelola dan sanitasi sebagai upaya mitigasi dampak kesehatan dan lingkungan (Peringkat 3).



Gambar 6 Isu prioritas bidang isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak berdasarkan LFA

Rob (Banjir Pasang Air Laut)

Isu paling krusial di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Sayung, adalah Rob (banjir pasang air laut). Rob bertindak sebagai pemicu utama berbagai kerusakan, yang diperparah oleh fenomena *land subsidence* (penurunan muka tanah) yang sangat cepat. Penurunan tanah, yang disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebihan dan faktor geologis, mengakibatkan ketinggian daratan semakin di bawah muka air laut, membuat genangan pasang menjadi permanen. Dampak rob sangat luas, menyebabkan kerusakan parah pada perumahan dan pemukiman (menambah beban ekonomi masyarakat karena harus melakukan peninggian lantai rumah berulang kali), kerusakan jalan dan jembatan, serta memicu masalah sanitasi dan kesehatan seperti penyakit kulit dan DBD. Upaya mitigasi dari pemerintah mencakup pendekatan struktural seperti pengajuan pembangunan tanggul laut sistem polder dan solusi adaptif seperti pengembangan rumah apung atau rumah panggung.

Abrasi (Pengikisan Pantai)

Penyebab abrasi di Demak bersifat ganda: faktor alamiah berupa gelombang dan arus laut, serta faktor antropogenik. Faktor manusia yang paling dominan adalah aliansi fungsi lahan, di mana eksploitasi dan kerusakan hutan mangrove untuk tambak telah menghilangkan benteng alam, serta pengaruh dari *Land Subsidence* yang mempercepat intrusi air laut ke daratan. Dampaknya adalah hilangnya daratan hingga ratusan hektar di wilayah pesisir, seperti Desa Bedono dan Morosari, yang menyebabkan perubahan total mata pencaharian warga dari pertanian/perikanan menjadi aktivitas lain serta menyebabkan lahan permukiman semakin tenggelam. Solusi yang didorong oleh pemerintah dan akademisi mencakup pembangunan infrastruktur keras seperti *hybrid sea wall* dan mitigasi berbasis ekosistem melalui rehabilitasi dan penanaman mangrove.

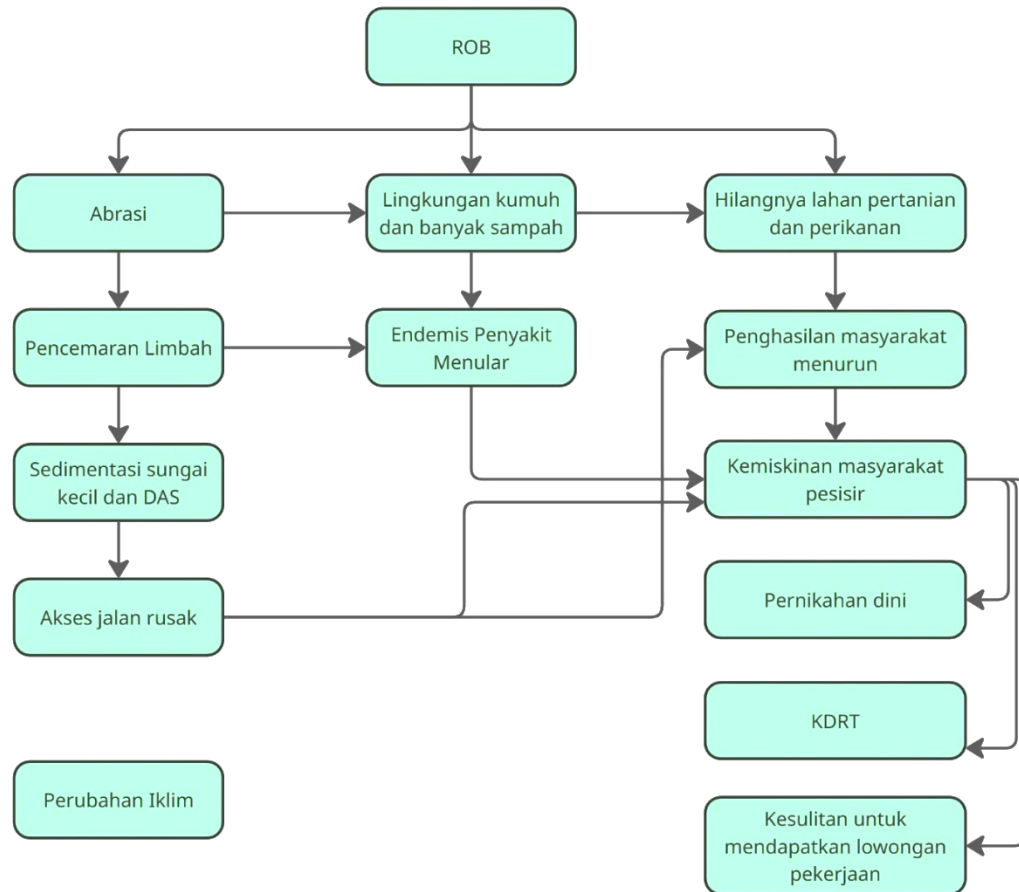
Belum Adanya Infrastruktur Pengaman Pesisir

Isu belum adanya infrastruktur pengaman pesisir merupakan kelemahan tata ruang dan teknis yang secara langsung memperburuk rob dan abrasi. Kekosongan infrastruktur teknis (seperti tanggul laut, *sea wall*, atau *pemecah ombak*) serta belum terintegrasinya solusi berbasis alam (seperti rehabilitasi mangrove) menjadikan kawasan pesisir sangat rentan terhadap gelombang pasang. Dampak dari ketiadaan infrastruktur ini adalah kerusakan total fasilitas umum dan rusaknya akses transportasi, yang mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Solusi yang sedang diupayakan pemerintah daerah, sebagai bagian dari penanganan jangka panjang, adalah mengusulkan dan merencanakan pembangunan tanggul laut dengan sistem polder di wilayah Sayung untuk menciptakan perlindungan fisik yang lebih permanen terhadap ancaman rob dan abrasi.



3.2.3. Permasalahan dan Solusi Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Demak

Berikut pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir Kabupaten Demak serta pemeringkatan isu strategis berdasarkan skala prioritas menggunakan *Logical Framework Analysis*:



Gambar 7 Peta sosial ekonomi Kabupaten Demak

Sumber: Hasil FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Demak

Tabel 4 Skala prioritas isu sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Demak

No	Isu Permasalahan	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
1	Rob	6	0	6	1
2	Abrasi	4	1	5	1

No	Isu Permasalahan	Penyebab	Akibat	Nilai	Peringkat
3	Lingkungan kumuh	2	2	4	2
4	Hilangnya lahan	2	2	4	2
5	Pencemaran limbah	4	1	5	1
6	Ardenus penyakit menular	4	1	5	1
7	Penghasilan masyarakat menurun	2	3	5	1
8	Normalisasi sungai	2	1	3	2
9	Akses jalan rusak	4	1	5	1
10	Kemiskinan masyarakat pesisir	0	3	3	2
11	Perubahan iklim				

Berdasarkan analisis skala prioritas isu sosial-ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Demak, permasalahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua peringkat utama. Isu-isu yang menempati Peringkat 1 adalah masalah yang paling mendesak, dengan total nilai tertinggi 5 hingga 6, dan harus menjadi fokus penanganan segera. Kelompok ini sangat luas, mencakup enam isu krusial: Rob (Nilai 6), Abrasi (Nilai 5), Pencemaran limbah (Nilai 5), Endemi penyakit menular (Nilai 5), Penghasilan masyarakat menurun (Nilai 5), dan Akses jalan rusak (Nilai 5). Pola dalam peringkat ini menunjukkan bahwa bencana alam (rob dan abrasi) secara langsung memicu krisis lingkungan (pencemaran limbah dan akses jalan rusak) dan krisis sosial-ekonomi (penghasilan masyarakat menurun dan endemi penyakit menular), menjadikannya mata rantai yang saling terkait.

Selanjutnya, isu-isu dalam Peringkat 2 merepresentasikan konsekuensi dan faktor pemicu yang signifikan terhadap isu Peringkat 1, yang memerlukan perhatian berkelanjutan untuk memutus lingkaran masalah. Kelompok ini terdiri dari empat isu, dengan nilai total 3 hingga 4: Lingkungan kumuh (Nilai 4), Hilangnya lahan (Nilai 4), Normalisasi sungai (Nilai 3), dan Kemiskinan masyarakat pesisir (Nilai 3). Isu-isu ini seringkali bertindak sebagai akibat yang berkepanjangan atau kondisi dasar yang

memperburuk keadaan. Contohnya, Hilangnya lahan (Penyebab 2, Akibat 2) adalah dampak langsung dari rob dan abrasi yang kemudian memicu Penghasilan masyarakat menurun di Peringkat 1. Demikian pula, Kemiskinan masyarakat pesisir (Penyebab 0, Akibat 3) adalah hasil akhir dari serangkaian kerusakan yang terjadi di atasnya, yang selanjutnya dapat memicu kerentanan sosial lainnya.

Secara keseluruhan, sebaran isu menunjukkan bahwa upaya mitigasi harus berfokus secara holistik. Penanganan harus dimulai dari pengendalian bencana pesisir (rob dan abrasi) sebagai penyebab utama kerusakan fisik dan lingkungan (pencemaran limbah dan akses jalan rusak). Secara paralel, perlu ada intervensi cepat pada dampak sosial-ekonomi seperti pemulihan penghasilan masyarakat menurun untuk mengatasi kemiskinan dan perbaikan sanitasi lingkungan untuk menekan ardenus penyakit menular. Mengingat bahwa perubahan iklim tidak memiliki nilai dalam tabel, tetapi secara kontekstual diakui sebagai faktor yang memperparah semua isu pesisir sehingga perencanaan jangka panjang harus mengintegrasikan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memastikan keberhasilan solusi yang berkelanjutan.



Gambar 8 Isu prioritas bidang sosial ekonomi Kabupaten Demak berdasarkan LFA

Rob (Banjir Pasang Air Laut)

Rob (Banjir Pasang Air Laut) menjadi pemicu krisis utama di Kabupaten Demak, mengindikasikan perannya sebagai akar penyebab dari berbagai masalah turunan. Penyebab utamanya adalah kombinasi antara *Land Subsidence* (penurunan muka tanah) yang cepat akibat eksploitasi air tanah dan kondisi geologis, diperparah oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Dampak dari rob bersifat menyeluruh, memicu terjadinya abrasi dan menjadi sumber masalah bagi lingkungan kumuh, kerusakan akses jalan, dan krisis sosial-ekonomi seperti penghasilan masyarakat menurun karena terganggunya aktivitas produksi dan mobilitas.

Abrasi (Pengikisan Pantai)

Abrasi merupakan ancaman fisik yang menghapus batas daratan dan laut. Penyebab utamanya, seperti dijelaskan dalam laporan Kemenko Maritim dan penelitian geospasial, adalah *Land Subsidence* yang mempercepat intrusi air laut ke daratan, di samping hilangnya penyangga alami, yaitu hutan mangrove, yang dikonversi menjadi tambak. Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir tetangga juga mengubah pola arus dan memperkuat pengikisan. Dampaknya adalah hilangnya lahan pertanian dan perikanan (tambak) secara permanen, seperti yang dialami Desa Bedono, yang memaksa warga untuk mengubah mata pencaharian dan memicu pencemaran limbah yang masuk kembali ke daratan bersama air pasang.

Pencemaran Limbah

Isu Pencemaran limbah menunjukkan krisis lingkungan yang muncul sebagai konsekuensi dari bencana pesisir. Penyebab utama pencemaran ini terkait dengan kerusakan sistem drainase dan sanitasi yang diakibatkan oleh Rob, di mana air laut membawa kembali limbah dan sampah ke

permukiman. Selain itu, erosi akibat Abrasi juga dapat memobilisasi sedimen dan polutan lama. Dampak krusial dari pencemaran limbah ini adalah terciptanya lingkungan kumuh dan peningkatan risiko Ardenus Penyakit Menular pada masyarakat pesisir serta menjadi salah satu faktor penyebab stunting di pesisir. Kondisi ini diperburuk oleh rusaknya akses air bersih akibat intrusi air laut yang asin, sebagaimana dikaji dalam valuasi ekonomi kerugian abrasi di Demak.

Ardenus Penyakit Menular

Endemi Penyakit Menular menjadi isu kesehatan masyarakat. Permasalahan ini bukan muncul secara alamiah, melainkan sebagai akibat langsung dari krisis lingkungan dan sanitasi. Pemicunya adalah lingkungan kumuh dan penumpukan sampah yang berkepanjangan akibat genangan rob dan pencemaran limbah. Rusaknya infrastruktur sanitasi, kurangnya akses air bersih layak, dan genangan air berlumpur menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran vektor penyakit. Dampak kesehatan ini secara langsung mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, menurunkan kualitas hidup, dan menambah beban pengeluaran keluarga di tengah kondisi penghasilan masyarakat menurun.

Penurunan Penghasilan Masyarakat

Penghasilan masyarakat menurun merefleksikan dampak sosial-ekonomi yang mendalam. Penyebab utamanya adalah hilangnya lahan pertanian dan perikanan (tambak) secara masif akibat rob dan abrasi. Laporan studi kasus di Sayung menunjukkan bagaimana lahan produktif berubah menjadi perairan terbuka telah menghilangkan sumber pendapatan utama warga. Dampak dari penurunan penghasilan ini adalah eskalasi kemiskinan masyarakat pesisir dan munculnya kerentanan sosial seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan, kekerasan dalam rumah tangga



(KDRT), dan perkawinan anak. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi, bahkan dengan cara-cara yang merugikan seperti alih profesi atau ketergantungan pada bantuan.

Akses Jalan Rusak

Kerusakan akses merupakan hambatan infrastruktur utama yang melumpuhkan mobilitas dan ekonomi. Penyebab rusaknya jalan adalah genangan rob yang terjadi setiap hari dalam durasi lama (hingga 6-8 jam per hari di Kecamatan Sayung), ditambah dengan kerusakan korosif akibat air laut dan faktor *Land Subsidence* yang membuat permukaan jalan semakin rendah. Dampaknya, sebagaimana dilaporkan, adalah terhambatnya jalur logistik (terutama di ruas Semarang-Demak), terganggunya aktivitas ekonomi warga, dan penurunan kualitas hidup karena sulitnya akses ke fasilitas umum dan layanan kesehatan. Kerusakan ini juga secara tidak langsung menekan penghasilan masyarakat karena meningkatnya biaya operasi transportasi dan makin panjangnya waktu tempuh.

3.3. Penilaian berdasarkan State of the Coast (SOC)

Pada dokumen *State of the Coast* (SOC) atau Status Lingkungan Pesisir Kabupaten Demak tahun 2023, ditemukan beberapa gap terkait pengelolaan pesisir di Kabupaten Demak. Gap ini diidentifikasi melalui serangkaian parameter maupun indikator yang disusun berdasarkan rumusan PEMSEA (2008) yang dimodifikasi ke dalam dua aspek, 11 indikator, dan 25 parameter. Berikut disajikan hasil analisis gap berdasarkan aspek hingga parameter serta grafik yang menggambarkan kondisi status lingkungan pesisir Demak pada tahun 2023.

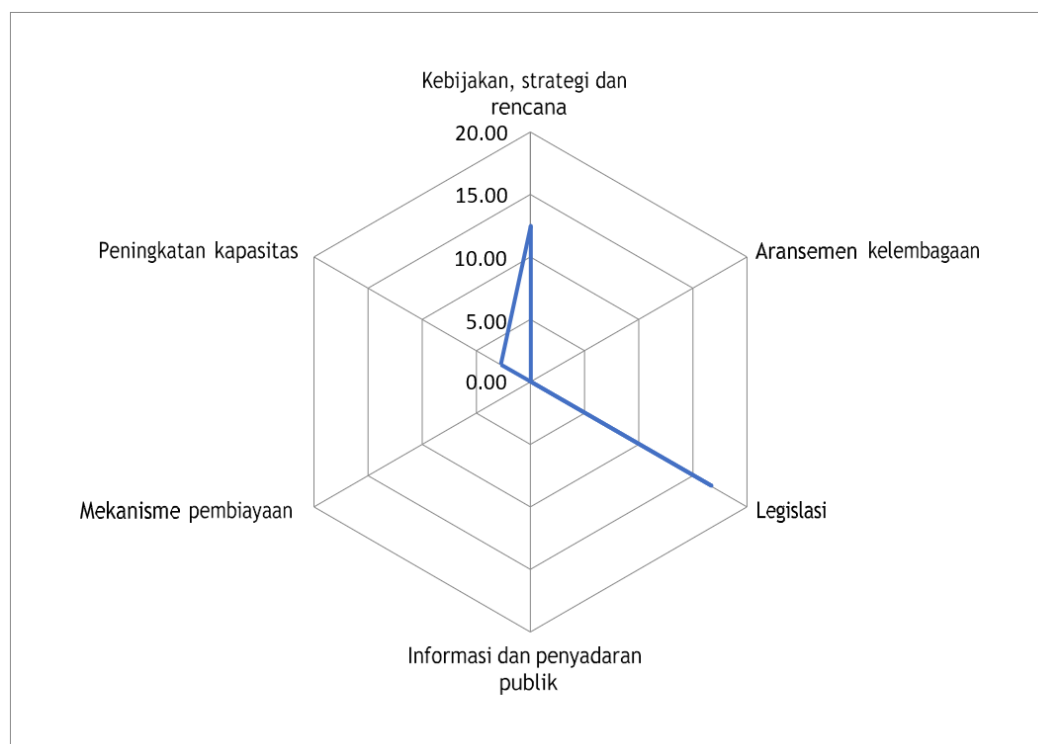
Kabupaten Demak menunjukkan kapasitas pengelolaan pesisir yang cenderung fluktuatif, dengan capaian yang bervariasi antar indikator. Kekuatan yang telah dimiliki secara jelas terlihat pada aspek-aspek perencanaan dan legalitas, seperti kategori kebijakan, strategi, dan rencana terkait Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM) serta ketersediaan legislasi yang memadai. Pada pilar pembangunan berkelanjutan, kapasitas yang baik juga ditunjukkan pada elemen pemanfaatan sumber daya air dan sebagian besar komponen yang terkait dengan ketahanan pangan serta peningkatan mata pencaharian masyarakat.

Namun, pada aspek tata kelola, kesenjangan terbesar dan paling krusial teridentifikasi pada pilar-pilar implementasi. Kelemahan fundamental terlihat pada indikator mekanisme pendanaan, di mana belum ada skema pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pengelolaan pesisir terpadu. Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas dan keahlian teknis yang memadai dalam bidang ICM, sehingga menghambat eksekusi dari rencana yang sudah ada.

Pada aspek pembangunan berkelanjutan, kesenjangan signifikan lainnya adalah masih rendahnya kapasitas dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan habitat, khususnya untuk ekosistem pesisir, termasuk perlindungan bagi kekayaan alam maupun warisan budayanya. Kelemahan serupa juga ditemukan pada indikator rencana pengelolaan pencemaran dan sistem pemantauan kualitas air. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa pada tataran praktik di lapangan, aktivitas pemantauan untuk kualitas sanitasi dan pengelolaan limbah industri justru telah menunjukkan adanya praktik yang baik. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Demak masih memiliki beberapa kesenjangan penting yang perlu



diintervensi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir yang optimal.



Gambar 9 Diagram radar posisi antar elemen tata kelola Kabupaten Demak

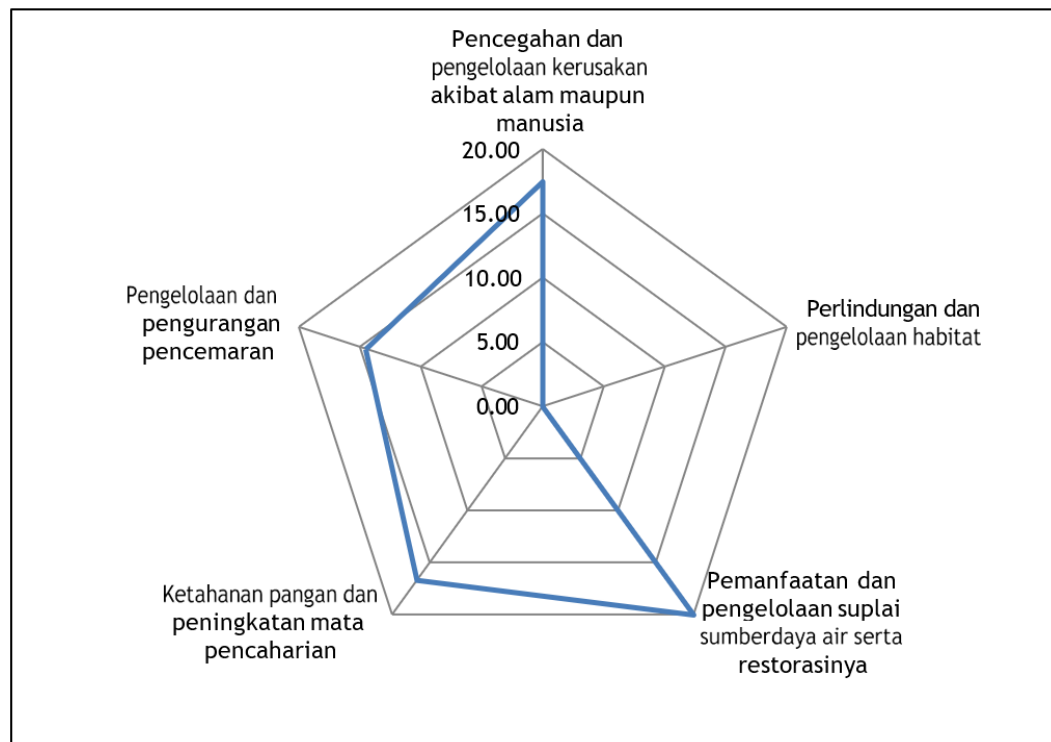
Sumber: *State of the coast* Kabupaten Demak, 2023

Diagram radar tata kelola Kabupaten Demak menunjukkan adanya disparitas yang ekstrem antara kekuatan pada aspek normatif dan kelemahan absolut pada aspek fungsional. Kekuatan utama secara dominan terletak pada elemen Legislasi, yang mencatatkan skor sangat tinggi (mendekati 19.00), didukung oleh skor tinggi pada Kebijakan, strategi dan rencana (sekitar 14.00-15.00). Profil ini mengindikasikan bahwa secara formal, Kabupaten Demak telah berhasil membangun fondasi hukum dan kerangka perencanaan strategis yang sangat memadai. Dokumen-dokumen legal dan rencana induk yang diperlukan untuk pengelolaan pesisir secara teoretis telah tersedia dan kokoh.

Namun, kekuatan pada tataran perencanaan tersebut menjadi tidak berarti ketika dihadapkan pada pilar-pilar implementasinya. Diagram ini secara gamblang menunjukkan kondisi lumpuh pada empat dari enam elemen krusial. Tiga elemen Peningkatan kapasitas, Mekanisme pembiayaan, dan Informasi dan penyadaran publik semuanya mencatatkan skor nol (0.00). Hal ini menandakan ketiadaan total investasi pada pengembangan SDM, tidak adanya alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta absennya upaya sosialisasi dan pelibatan publik. Kondisi ini diperparah oleh skor Aransemen kelembagaan yang sangat rendah (sekitar 2.00), yang menunjukkan lemahnya institusi pelaksana.

Secara sintesis, diagram ini mendiagnosis adanya kesenjangan implementasi yang sangat tajam. Kabupaten Demak memiliki legislasi dan rencana yang kuat dalam dokumen perencanaan legal, namun sama sekali tidak memiliki prasyarat operasional untuk menjalankannya: tidak ada institusi yang efektif, tidak ada anggaran, SDM yang mumpuni tidak mencukupi, dan tidak ada dukungan publik. Tanpa intervensi mendesak untuk membangun empat pilar fungsional yang hilang ini dari nol, seluruh kerangka kebijakan dan legislasi yang sudah ada berisiko hanya menjadi "dokumen mati" yang tidak berdampak.





Gambar 10 Diagram radar posisi antar elemen pembangunan berkelanjutan Kabupaten Demak

Sumber: *State of the coast* Kabupaten Demak, 2024

Diagram radar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Demak menyajikan sebuah profil strategis yang sangat terfokus pada manajemen risiko dan keamanan sumber daya dasar. Dua elemen yang paling dominan adalah Pencegahan dan pengelolaan kerusakan akibat alam maupun manusia (skor 18.00) dan Pemanfaatan dan pengelolaan suplai sumberdaya air (skor 17.50). Skor yang sangat tinggi pada kedua poros ini secara jelas mengindikasikan bahwa paradigma pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak untuk mitigasi bencana kemungkinan besar terkait dengan banjir, rob, dan abrasi serta untuk menjamin ketersediaan air bersih dan irigasi.

Kekuatan pada dua pilar resiliensi tersebut didukung oleh capaian yang juga tinggi pada elemen Ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian (skor 14.00) dan Pengelolaan dan pengurangan pencemaran

(skor 13.50). Kombinasi dari keempat elemen ini menunjukkan sebuah model pembangunan yang komprehensif dalam upaya mengamankan fondasi sosial-ekonomi. Prioritasnya adalah memastikan masyarakat terlindung dari bencana, memiliki akses terhadap air dan pangan, serta mengelola dampak negatif (pencemaran) dari aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan tersebut.

Namun, potret pembangunan ini menunjukkan satu kesenjangan yang sangat kritis dan fundamental, yaitu pada elemen Perlindungan dan pengelolaan habitat yang mencatatkan skor terendah (skor 5.00). Jurang yang sangat lebar ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan serius, di mana pembangunan berfokus pada solusi infrastruktur fisik dan pengelolaan gejala, namun mengabaikan fondasi ekologi. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap habitat (seperti mangrove, estuari, atau sempadan sungai) justru dapat memperburuk risiko bencana dan mengancam keberlanjutan suplai air serta ketahanan pangan, menciptakan sebuah strategi pembangunan yang rapuh.

Namun, untuk mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat dirumuskan dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Demak.



Tabel 5 Matriks rangkuman temuan kunci SOC dan rekomendasi

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
1	Kebijakan dan Strategi ICM	• Profil pesisir tidak ditemukan secara khusus dalam beberapa dokumen di Kabupaten Demak • Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dimuat dalam Perda No. 13/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 • Pemerintah Kabupaten Demak memiliki Peraturan Bupati Demak Nomor 11/2012 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak • Gender sudah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Demak. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, yang memuat Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Pengarusutamaan Gender di Daerah (PUG) yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.	• Pemerintah Kabupaten Demak masih melakukan berbagai program terkait pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah, serta pemasar ikan skala kecil, termasuk di dalamnya adalah perempuan yang dominan bekerja di pengolah dan pemasar. Terkait dengan kewenangan, perlu adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga keterbatasan anggaran dan SDM bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah terkait Kabupaten Demak.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
2	Aransemen Kelembagaan	Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir pada Peraturan Bupati Demak Nomor 11/2012 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak	Bapperida Kabupaten Demak memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan hingga evaluasi, perlu didukung oleh unit kerja yang bersifat non-struktural. Salah satu contoh unit kerja ini adalah <i>Program Coordinating Committee</i> (PCC) dan <i>Program Management Office</i> (PMO). Keberadaan lembaga ini tidak hanya mengkoordinasikan tugas dan fungsi antara OPD/Badan yang terkait dengan pembangunan wilayah pesisir dan laut, akan tetapi juga menjadi sekretariat bersama dalam mensinkronkan dan mengharmoniskan antar program OPD/Badan
		- Perencanaan pembangunan mulai tingkat daerah hingga pusat dimulai dengan MUSRENBANG berdasarkan PP Nomor 8/2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Musrenbang dilaksanakan oleh Bapperida dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga diakomodir dalam PP	Partisipasi publik mendapatkan pengakuan dalam Musrenbang dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Namun demikian, dalam rangka membuka akses publik secara luas pada setiap dokumen perencanaan, maka diperlukan kreativitas penyampaian dokumen dalam berbagai media informasi. Hal ini dalam rangka

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dimuat dalam Perda Jawa Tengah Nomor 13/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038	meningkatkan keterbukaan dan peningkatan akses publik pada dokumen
3	Legislasi dan Kepatuhan	• Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung • Pencegahan pencemaran air dan udara dari perusahaan yang dipantau belum sepenuhnya mentaati dokumen lingkungan maupun peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan,	• Dinas Lingkungan Hidup tidak terdampak serius oleh UU No. 23 Tahun 2014, sehingga keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sangat penting keberadaannya dalam mengawal keberlanjutan wilayah pesisir dan laut dari ancaman kerusakan. Oleh sebab itu, optimalisasi dari tugas dan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak perlu dikuatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		sesuai dengan kriteria persyaratan teknis maupun administratif yang telah ditetapkan.	
		• Pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi dominan bersumber dari pengaduan masyarakat. • Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan terdiri dari jumlah mediasi sengketa lingkungan dan jumlah kasus yang berlanjut ke penegakan hukum.	• Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks memerlukan keterlibatan semua para pemangku kepentingan terkait. Selain itu diperlukan kedisiplinan, transparansi, kejujuran dan keberanian aparat dalam menegakkan hukum bagi pelanggarnya.
4	Informasi dan Penayadaran Publik	• Kegiatan terkait informasi dan pendidikan publik hanya bersifat insidental dan tidak berada dalam kerangka program berjangka menengah ataupun panjang dengan capaian-capaian yang terukur. • Tidak ada strategi komunikasi yang terbangun di Kabupaten Demak. Oleh karena itu, pada tema publikasi dan informasi ini, statusnya masih berada pada level basic. • Belum ada media atau <i>platform</i> digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk informasi program lingkungan di Kabupaten Demak.	• Pemerintah Kabupaten Demak dapat menyusun strategi komunikasi lingkungan, mengagregasi informasi program-program termasuk oleh pihak eksternal dan menyajikannya secara rutin dan sistematis pada media atau platform yang dengan mudah diakses oleh masyarakat

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		• Belum optimalnya keterlibatan <i>stakeholder</i> di Kabupaten Demak, hal ini dikarenakan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik. • Belum adanya mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non- pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik.	• Perlu disusun mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non- pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik.
5	Mekanisme Pembiayaan	• Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir secara menjadi terbatas yang berdampak pada program perencanaan termasuk penganggarannya. • Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir masih dilakukan secara parsial, belum ada lembaga bersama yang menjadi sekretariat dalam melakukan koordinasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pendanaan kegiatan wilayah pesisir masih berdasarkan pada penganggaran kegiatan tahunan di masing-masing OPD, belum ada aturan yang mengatur mekanisme pendanaan terkait dengan program pengelolaan	• Perlu adanya lembaga yang dapat mengkoordinasikan organisasi antar perangkat daerah (OPD), serta <i>stakeholder</i> sekaligus menjadi sekretariat bersama dalam melakukan sinkronisasi program-program pembangunan wilayah pesisir secara terpadu, sekaligus mengatur mekanisme pendanaan bersama. • Inisiasi pembiayaan non-konvensional seperti dana sosial perusahaan, dana publik/crowd funding ataupun jenis pembiayaan lain

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan <i>stakeholder</i> .	
6	Peningkatan Kapasitas	• Belum ada alokasi bagi program peningkatan kapasitas pengelolaan pesisir terpadu, yang ada baru pelatihannya tematik/spesifik. • kerjasama lintas sektor dan/atau dengan lembaga pendidikan/NGO dalam program peningkatan kapasitas belum ada. Yang sudah dilakukan adalah kegiatan koordinasi. • Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di lingkungan Kabupaten Demak masih pada level kegiatan yang bersifat basic, insidental dan tidak terencana dengan utuh	• Penguatan kemitraan dan transfer pengetahuan dengan mitra tersebut. • ICM belum menjadi subjek yang menyatukan seluruh isu dan kebutuhan pada peningkatan kapasitas. • Keterlibatan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan edukasi dan penyadaran masyarakat dalam program ICM di Kabupaten Demak, sehingga Pemerintah Demak perlu mengidentifikasi <i>stakeholder</i> potensial dalam mendukung program pendidikan dan penyadaran masyarakat dalam konteks ICM atau pengelolaan terpadu, bukan lagi parsial.
		• Pemerintah Kabupaten Demak belum memiliki staf yang berlatar pendidikan di bidang pengelolaan pesisir dan laut	• Dibutuhkan wahana bagi SDM yang sudah memiliki pengalaman dan terpapar oleh ICZM

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam skema program ICM di tingkat kabupaten. Setelah wahana tersebut ada, personil dan staf di dalamnya dapat diperluas ke staf atau SDM lain yang sekiranya relevan dengan kerja-kerja pengelolaan pesisir terpadu
7	Pencegahan Kerusakan Alam dan Manusia	- Status kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir Kabupaten Demak masih pada tingkat rendah akibat masih minimnya <i>tools</i> regulasi, operasional maupun bentuk-bentuk kajian menyangkut perubahan iklim dan bencana di pesisir. - Dari sisi norma dan regulasi pengurangan kerentanan dari dampak bencana berbasis iklim, Pemerintah Kabupaten Demak belum memiliki kajian secara spesifik sehingga muatan perubahan iklim dalam kajian terbaru (KRB 2022- 2026) juga tidak memberi tekanan besar pada bencana berbasis iklim.	- Kajian Risiko Bencana Kabupaten Demak 2022-2026 sebaiknya dilanjutkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak 2023-2027 dengan menambahkan kajian mengenai bencana berbasis iklim. - Melakukan kajian mengenai dampak perubahan iklim di wilayah pesisir secara spesifik dan menetapkan prioritas wilayah terdampak dan subjek terdampak. - Menggunakan kajian mengenai dampak perubahan iklim di wilayah pesisir ke dalam Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim yang berkekuatan hukum untuk menjadi landasan bagi sektor-sektor untuk menyusun

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8	Perlindungan dan Pengelolaan Habitat	• Belum tersedianya walidata untuk habitat/ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut dan bahkan untuk data terbaru. • Legalitas program perlindungan habitat pesisir, warisan alam dan budaya belum tersedia, terutama yang berada dan teridentifikasi di wilayah pesisir, atau berhubungan erat dengan kebaharian atau kemaritiman. • Adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi pemerintah Kabupaten Demak untuk mengelola wilayah pesisirnya.	• Pemutakhiran data secara berkala untuk habitat/ekosistem <i>mangrove</i> dan sumberdaya pesisir lainnya (terrestrial). • Dokumen dan legalitas hukum atau kebijakan rencana pengelolaan perlu dibuat agar upaya pengelolaan dapat lebih fokus dan efektif. • Pemerintah Kabupaten Demak dapat mengambil peran dalam mengelola wilayah pesisirnya pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai peran aktif masyarakat mengelola wilayah pesisir.
9	Pemanfaatan dan Pengelolaan Suplai Sumberdaya Air	• Perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya untuk kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. • Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten, penanganan banjir dan rob,	• Perlunya usulan kajian dalam perluasan kawasan perkotaan dan percepatan pembangunan untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) serta peningkatan sarana dan prasarana objek wisata

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		rehabilitasi tanggul sungai, penataan trotoar dan drainase, serta sistem pengelolaan air minum (SPAM).	Kajian khusus sendiri terhadap akses masyarakat di pesisir untuk penggunaan air bersih.
10	Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mata Pencaharian	- Program-program yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah pesisir masih didominasi oleh program di sektor perikanan seperti yang tertuang dalam rencana aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Ada tiga program utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. - Adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat beberapa program pengelolaan sumber daya seperti program rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan tidak lagi menjadi program prioritas pemerintah kabupaten.	Perlu adanya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, baik bersifat horizontal yakni antar OPD maupun antar pemerintah kabupaten/kota lainnya maupun secara vertikal yakni kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Program pengembangan perikanan tangkap meliputi pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, padat karya nelayan, penyaluran beras paceklik untuk nelayan, diversifikasi usaha nelayan, sosialisasi/pembinaan nelayan, pembuatan kartu nelayan dan asuransi nelayan, pembangunan/peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap, pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, diversifikasi usaha petambak garam, peningkatan/pembangunan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengawasan wilayah pesisir, peningkatan/pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut, dan pemeliharaan wilayah pesisir. - Program-program pengembangan budidaya perikanan meliputi pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan pengembangan perikanan dan pembangunan/peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan.	- Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan ruang laut - Pencatatan data statistik perikanan telah dibuat secara series data tahunan. Namun demikian, data perikanan merupakan data yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan data yang lebih rinci dengan periode bulanan dan terisi dengan lengkap.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		• Program pengembangan kegiatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan meliputi pendampingan pada kelompok pengolah/pemasar, peningkatan konsumsi makan ikan, peningkatan kualitas pangan berbahan baku ikan, ekspor produk perikanan dan pembangunan/peningkatan sarana prasarana untuk optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. • Produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan mengalami fluktuasi, namun ada juga yang mengalami peningkatan yang konsisten. • Perkembangan data produksi perikanan di Kabupaten Demak telah tersedia secara series tahunan.	
		• Kasus gizi buruk di Kabupaten Demak mempunyai kecenderungan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH)-nya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.	• Perlu ada upaya penyediaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana) kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan secara khusus pada faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			status gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya balita. Tidak hanya penekanan pada faktor langsung, yakni berkaitan dengan kecukupan asupan gizi melalui konsumsi makanan dan terhindar dari berbagai infeksi penyakit, tetapi juga menekankan pada faktor tidak langsung seperti ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
		• Persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak memiliki tren menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2021, hingga pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Namun kembali turun pada tahun 2022. • Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Demak untuk SD/MI sebesar 107,05 namun Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 98,08%; APK untuk SMP/MTs sebesar 100,36 namun APM-nya sebesar 80,62; dan APK untuk SMA/MA/Sederajat sebesar 100,07 namun APM-nya sebesar 59,1.	• Perlu ada upaya penyediaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana) yang berkualitas dengan: 1) Membentuk tim penilaian kapasitas fiskal daerah yang baru setelah diberlakukannya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) Belanja daerah tahun 2022 dan 2023 difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi <i>mandatory spending</i> atau belanja-belanja yang menjadi urusan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,23 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28 persen. Serapan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia cukup besar, didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke atas. Sedangkan, jenis lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja menggunakan pendekatan PDRB, diketahui kontributor utama serapan tenaga kerja berasal dari sektor Industri pengolahan, diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.	wajib, khususnya urusan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan usaha; 3) DPRD merekomendasikan untuk mengutamakan belanja intervensi program kegiatan prioritas sesuai urusan yang diampu (<i>intervention spending</i>); dan 4) Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa mandiri dan memiliki keterampilan khusus.
		- Data mata pencaharian masyarakat pesisir masih didominasi dari sektor perikanan yakni tercatat sebanyak 8.547 orang meliputi nelayan (54,07%), perikanan budidaya (19,6%), petambak garam (6,41%), pengolah ikan (9,98%), dan pemasar ikan (9,95%). - Program-program pengembangan mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Demak sudah dilakukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, antara lain:	- Umumnya mata pencaharian masyarakat pesisir di sektor perikanan bekerja pada kegiatan informal, sehingga masyarakat mudah beralih profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya program regenerasi yang memancing minat generasi muda bekerja pada sektor perikanan. - Program-program pengembangan mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir tidak hanya menjadi urusan Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan lintas sektor dengan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		pengembangan kapasitas nelayan, pengembangan kelembagaan nelayan, pemberdayaan bagi pembudidaya ikan, pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat pesisir terutama dalam akses IPTEK dan teknologi informasi, penyediaan data dan informasi usaha perikanan skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.	melibatkan instansi lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan lembaga yang dapat menjadi sekretariat bersama untuk mendukung ekosistem pengembangan masyarakat pesisir baik dari segi kebijakan maupun anggaran pengembangan programnya.
11	Pengurangan Pencemaran dan Dampak Pencemaran	• Rencana Tata ruang yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup adalah sesuai dengan RT RW • Kabupaten Demak telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 50,26 dari target 48,00 sehingga nilai persentase menjadi 105%. Untuk Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 54,83 dari target 54,83, meraih persentase 100%, sedangkan untuk Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 79,38 dari target 70,00, meraih 113,40%. Sementara itu data tahun 2020 mengenai kondisi drainase yang ada di	• Adapun program untuk bidang sanitasi yang dilakukan adalah peningkatan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan kebutuhan sanitasi juga sarana air bersih yang memadai sesuai jumlah Desa dan KK, dan pengelolaan limbah domestik yang lebih komprehensif. Diharapkan ketersediaan data yang lebih lengkap agar monitoring dan evaluasi akan bidang sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dapat dilakukan dengan lebih baik.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Kabupaten Demak, diperoleh panjang drainase 16.891,83 meter dan yang dalam kondisi baik terdata sepanjang 9.658,29 meter - Jumlah sarana air minum yang terdata pada 249 desa yang ada di Kabupaten Demak tahun 2020 adalah 1.041 unit, yang mana dari jumlah tersebut hanya 63,12% yang diawasi atau diperiksa kualitasnya termasuk sesuai standar atau aman untuk dikonsumsi. Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan akses sanitasi baik bersama maupun sendiri ditemukan dari 390.217 KK yang ada di Kabupaten Demak, persentase KK dengan akses sanitasi layak adalah 98,39% dan KK dengan akses terhadap sanitasi yang aman adalah 42,39% - Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam membangun infrastrukturnya, kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah domestik yang benar, keterbatasan lahan dalam pembangunan pengelolaan air limbah sistem <i>off-</i>	

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		<i>site</i> , penambahan penduduk yang tinggal, cakupan layanan air bersih belum merata dan penurunan kualitas lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal.	
		• Program pengelolaan pencemaran dan limbah B3 masih fokus di darat, dan belum secara khusus untuk wilayah pesisir. • Program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan limbah B3 masih belum terdokumentasi secara khusus dari dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup. • Data penyipanan limbah B3 belum terdokumentasi dan tersedia dengan baik, beserta tindak lanjutnya. • Pemantauan terkait dampak pencemaran terhadap masyarakat belum dilakukan, terutama terkait dampak limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang.	• Menyusun rencana pengurangan pencemaran dan dampak pencemaran dengan memasukkan wilayah pesisir dan laut. • Menyusun rencana pengelolaan pencemaran secara terstruktur secara terpisah, berdasarkan kategori jenis dan sumber pencemar. • Melakukan pendataan jumlah limbah B3 dari program yang sudah dijalankan. • Upaya penyadartahuan dari level masyarakat dan pelaku industri hendaknya lebih intensif dilakukan. Program pengelolaan dampak kepada masyarakat, terutama limbah B3, harus dilakukan secara berkala. Hal ini terkait dampak yang tidak langsung muncul saat kejadian pencemaran.

Tabel 6 Matriks isu strategis SoC, RPJPD Kab. Demak, dan RPJMD Kab Demak

Isu Strategis (Dokumen SOC 2023)	Relevansi RPJPD 2025-2045 (Visi 20 Tahun)	Relevansi RPJMD 2025-2029 (Target 5 Tahun)	Logical Framework Analysis (LFA) (FGD)
Banjir Rob & Kenaikan Muka Air Laut	Mewujudkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim secara jangka panjang.	Program mitigasi bencana pesisir dan pembangunan infrastruktur pengaman pantai/tanggul laut.	- Pembangun-an infrastruktur pengaman pesisir terintegrasi (<i>hard structure & nature- based</i>). - Pengamanan garis pantai berbasis rekayasa (struktur keras) dan ekosistem (struktur lunak).
Penurunan Tanah (Land Subsidence)	Perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan morfologi pesisir.	Pengendalian ekstraksi air tanah dan audit beban bangunan di zona rentan pesisir.	Pengendalian pemanfaatan air tanah dan rekayasa geoteknik.
Kerusakan Ekosistem Mangrove	Pelestarian biodiversitas pesisir sebagai benteng alami dan penyerap karbon.	Program rehabilitasi mangrove intensif dan perluasan kawasan konservasi pesisir.	Program Monitoring dan evaluasi mangrove yang sudah ditanam

Isu Strategis (Dokumen SOC 2023)	Relevansi RPJPD 2025-2045 (Visi 20 Tahun)	Relevansi RPJMD 2025-2029 (Target 5 Tahun)	Logical Framework Analysis (LFA) (FGD)
			Program penanaman mangrove di Pesisir Demak
Pencemaran Limbah B3 & Domestik	Mencapai kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang memenuhi standar kesehatan global.	Optimalisasi IPAL komunal, pengawasan limbah industri, dan peningkatan akses sanitasi aman.	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi yang layak, inklusif, dan berkelanjutan melalui perencanaan terpadu, peningkatan layanan dasar, serta kolaborasi lintas sektor.
Kerentanan Ekonomi Nelayan	Transformasi ekonomi biru dan kemandirian pangan berbasis potensi kelautan.	Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan program mata pencaharian alternatif.	- Menguatkan regulasi penggunaan alat tangkap - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya alat tangkap tidak ramah lingkungan

Isu Strategis (Dokumen SOC 2023)	Relevansi RPJPD 2025-2045 (Visi 20 Tahun)	Relevansi RPJMD 2025-2029 (Target 5 Tahun)	Logical Framework Analysis (LFA) (FGD)
			• Meyusun kesepakatan bersama/ kerifan lokal penetapan wilayah tangkap • Penetapan zona/wilayah tangkap
Keterbatasan Data Pesisir Terpadu	Integrasi sistem informasi berbasis data spasial untuk pengambilan kebijakan akurat.	Penyusunan basis data pesisir sektoral dan sinkronisasi data antar OPD di tingkat daerah.	Pemutakhiran data secara berkala untuk habitat/ekosistem <i>mangrove</i> dan sumberdaya pesisir lainnya (terrestrial).



BAB IV

KELEMBAGAAN

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Demak dilaksanakan secara partisipatif melalui pembentukan kelompok kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, maupun dunia usaha. Kelompok kerja ini memiliki mandat untuk merumuskan tujuan pengelolaan pesisir, mengidentifikasi dan memetakan isu-isu strategis, serta menyusun strategi dan rencana aksi yang terukur dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Pembentukan kelompok kerja tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Demak Nomor 660/252 Tahun 2025 tentang **Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Demak**, yang berfungsi sebagai forum koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program lintas sektor dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 7 Rancangan struktur tim koordinasi pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Demak

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1.	Pembina	1. Bupati Demak
		2. Wakil Bupati Demak
2. Tim Pengarah		
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
		3. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak
		4. Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
		7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
		8. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
		9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kelompok Bidang		
A. Bidang Ekologi Dan Sumber Daya Alam		
	Ketua	Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur Dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
		2. Kepala Bidang Penataan Dan Penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
		3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
		4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dan Menengah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak
		5. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
		6. Kepala Bidang Kepemudaan Dan Kepramukaan Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Demak

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
		7. Ketua Tim Kelompok Kerja Substansi Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
B. Bidang Sosial Ekonomi		
	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak
		2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak
		3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak
		4. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak
		5. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak
		6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak
		7. Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak
		8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
		9. Kepala Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Dan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
		10. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
		11. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
		12. Ketua Tim Kelompok Kerja Substansi Ekonomi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
C. Bidang Infrastruktur Dan Sanitasi		
	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
		2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak
		3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
		4. Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
		5. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Peralatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
		6. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
		7. Ketua Tim Kelompok Kerja Substansi Infrastruktur Dan Kewilayahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak
D. Bidang Kerjasama Dan Kemitraan		
	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Demak
	Anggota	1. Camat Sayung
		2. Camat Karangtengah
		3. Camat Bonang
		4. Camat Wedung

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
		5. Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
		6. Rektor Universitas Sultan Fatah
		7. Koordinator Oisca Kabupaten Demak
		8. Perwakilan Wetland International Indonesia
		9. Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari
		10. Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Demak
		11. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Demak
		12. Ketua Komunitas Peduli Sungai Lokajaya Kabupaten Demak
		13. Ketua Forum Demak Hijau Kabupaten Demak
		14. Ketua Forum Solusi Lingkungan Kabupaten Demak
		15. Ketua Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Demak
		16. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Demak
		17. Ketua Taruna Siaga Bencana Kabupaten Demak
		18. Ketua Lindungi Hutan Kabupaten Demak
		19. PT. Nusa Board Indonesia

Sinergi antar tingkat pemerintahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini harus diwujudkan melalui pelaksanaan program lintas sektor dan lintas wilayah yang mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, serta kapasitas kelembagaan di semua level pemerintahan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan desa. Pendekatan ini tidak hanya menekankan koordinasi administratif, tetapi juga mendorong kesatuan visi dan tindakan nyata dalam pengelolaan ruang darat-laut yang terpadu.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dan mitra strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program.

Partisipasi aktif masyarakat pesisir, terutama nelayan, petambak, perempuan, orang muda, dan kelompok rentan lainnya, perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, akses informasi, serta dukungan modal sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan pesisir tidak hanya memperkuat ketahanan ekologi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan dan iklim.

Tujuan akhir dari seluruh inisiatif ini adalah terwujudnya Kabupaten Demak yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengelolaan pesisir yang inklusif, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, harapan untuk mengamankan serta memajukan wilayah pesisir Demak menjadi lebih realistis. Pengelolaan yang dirancang secara terencana, responsif, dan berbasis ilmu pengetahuan akan menjadikan pesisir Kabupaten Demak tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi yang produktif, tetapi juga sebagai ekosistem yang lestari dan layak untuk diwariskan bagi generasi mendatang.



BAB V

STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN

5.1. Sintesis Isu Strategis

5.1.1. Sumber daya Alam dan Lingkungan

Isu ekosistem dan sumber daya alam di Kabupaten Demak dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan hingga perluasan kawasan industri. Penggunaan SODO (alat tangkap tidak ramah lingkungan) dan reklamasi mempercepat terjadinya abrasi dan penurunan kualitas garis pantai. Selain itu, alih fungsi lahan dari mangrove menjadi tambak memperburuk kerentanan ekologis kawasan pesisir dan mengakibatkan kehilangan habitat alami yang penting bagi biota pesisir.

Pengambilan air tanah yang berlebihan, reklamasi, dan alih fungsi lahan adalah kontributor utama terjadinya land subsidence atau penurunan muka tanah. Fenomena ini berdampak langsung pada peningkatan rob di kawasan pesisir Semarang, yang menyebabkan infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan lebih sering dan memerlukan biaya pemulihan yang sangat besar.

Abrasi serta rob memiliki dampak sistemik pada kerusakan fasilitas yang ada di pesisir, serta menurunkan kualitas air bersih. Kerusakan fisik tersebut memperburuk masalah sosial-ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya biaya hidup dan menurunnya daya dukung lingkungan untuk usaha produktif, khususnya di sektor perikanan dan pariwisata pesisir.

Intrusi air laut akibat pengambilan air tanah dan penurunan muka tanah memperbesar risiko kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Dampak

lain yang muncul adalah gangguan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya penyakit akibat air yang sudah tercemar dan genangan rob. Penyusutan garis pantai menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian sumber daya alam, kualitas air bersih, dan keberlanjutan usaha ekonomi lokal.

Perluasan kawasan industri tanpa perencanaan ekologi mempercepat kerusakan ekosistem pesisir. Pola ini mendorong kerusakan lingkungan secara luas, berimbas pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan makin berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Jika tidak ditangani secara terpadu, Kota Semarang akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya alam di masa depan

5.1.2. Infrastruktur dan Sanitasi

Isu infrastruktur dan sanitasi di Kabupaten Demak pesisir sangat kompleks, salah satunya dipicu oleh fenomena rob dan abrasi yang semakin parah akibat belum adanya infrastruktur pengaman pantai memadai. Rob dan abrasi mengakibatkan kerusakan pada lokasi perumahan, fasilitas umum, serta jalan dan jembatan sehingga penghidupan masyarakat pesisir menjadi rawan. Hal ini membuat kawasan tersebut rentan terhadap bencana hidrometeorologis dan menurunnya kualitas hunian.

Kurangnya akses air bersih dan sanitasi layak menjadi tantangan utama yang berdampak pada meningkatnya penyakit kulit, demam berdarah, dan gangguan kesehatan lain. Keterbatasan sarana sanitasi serta air bersih berdampak langsung pada produktivitas dan taraf hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang tinggal di wilayah permukiman pesisir dan terdampak rob.



Penumpukan sampah dan buruknya pengelolaan limbah memperbesar risiko kerusakan lingkungan, saluran drainase, serta pendangkalan muara sungai. Limbah yang tidak terkelola menjadi sumber pencemaran sehingga mempercepat kerusakan ekosistem, berkontribusi pada menurunnya akses nelayan, serta memperparah ancaman terhadap ekosistem mangrove di Kabupaten Demak.

Alih fungsi lahan dan kurangnya masterplan zonasi pesisir menyebabkan perubahan mata pencaharian masyarakat, membatasi ruang produksi nelayan, dan memicu kerusakan mangrove. Tidak adanya peta lahan mangrove dan perencanaan terpadu membuat perlindungan terhadap ekosistem penting terhambat, sehingga daya tahan pesisir terhadap abrasi dan bencana semakin menurun.

Secara keseluruhan, masalah infrastruktur dan sanitasi memunculkan rantai dampak yang saling terhubung: dari gangguan kesehatan masyarakat, penurunan akses layanan dasar, hingga kerusakan ekosistem. Akumulasi masalah tersebut memperlemah kesejahteraan, produktivitas, dan daya dukung lingkungan hidup di kawasan pesisir Kabupaten Demak sehingga intervensi lintas sektor sangat dibutuhkan.

5.1.3. Sosial Ekonomi

Isu sosial ekonomi Kabupaten Demak kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh fenomena rob yang menyebabkan lingkungan kumuh dan banyak sampah. Rob dan abrasi berkontribusi terhadap pencemaran limbah serta hilangnya lahan pertanian dan perikanan. Kondisi ini memperparah endemis penyakit menular di lingkungan tersebut dengan munculnya penyakit kulit dan demam berdarah, yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat setempat.

Hilangnya lahan produktif pertanian dan perikanan berakibat langsung pada penurunan penghasilan masyarakat pesisir Semarang. Penurunan hasil ekonomi ini juga berimbas pada meningkatnya kemiskinan, memperlemah daya beli, dan mengurangi akses terhadap kebutuhan dasar. Keadaan ini mendorong terjadinya pergeseran pola hidup dan pekerjaan, sehingga masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok.

Kemiskinan masyarakat pesisir menimbulkan dampak sosial dengan meningkatnya angka pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesulitan memperoleh lowongan pekerjaan. Piranti sosial ini saling terkait dan memperbesar potensi siklus kemiskinan antar generasi. Penurunan penghasilan serta sulitnya akses pekerjaan akibat kerusakan lahan memperlemah ketahanan ekonomi keluarga di wilayah pesisir.

Pencemaran limbah dan sedimentasi sungai kecil serta DAS berdampak pada perbaikan akses jalan yang semakin rusak dan tidak optimal. Kerusakan infrastruktur turut menghambat mobilitas masyarakat, akses pendidikan, distribusi barang, dan layanan kesehatan. Kondisi akses jalan rusak menghambat peluang masyarakat pesisir untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan sosial mereka.

Perubahan iklim memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan memperparah dampak rob serta abrasi di Kabupaten Demak. Lingkungan yang semakin kumuh, pendapatan masyarakat yang terus menurun, dan meluasnya dampak sosial seperti pernikahan dini dan KDRT menuntut penanganan lintas sektor serta kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan agar siklus kemiskinan dan kerusakan sosial ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten Demak dapat diputus.



Tabel 8 Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Kab. Demak

Kelompok Isu Besar	Sub Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
Sumber Daya Alam & Lingkungan	Alat tangkap tidak ramah lingkungan, reklamasi, abrasi, alih fungsi lahan, land subsidence, perluasan kawasan industri, degradasi mangrove	Penggunaan alat tangkap destruktif, reklamasi masif, alih fungsi mangrove, ekstraksi air tanah berlebih, perluasan industri	Kerusakan ekosistem, penurunan garis pantai, kerusakan fasilitas, penurunan kualitas air, gangguan kesehatan, menurunnya daya dukung ekonomi lokal, intrusi air laut
Infrastruktur & Sanitasi	Rob, abrasi, kurangnya infrastruktur pengaman pesisir, sanitasi/air bersih minim, limbah dan sampah, akses buruk, belum ada pemetaan dan masterplan mangrove	Infrastruktur pencegahan dan pengelolaan belum memadai, tata kelola limbah buruk, fasilitas air bersih minim, perencanaan zonasi lemah	Kerusakan permukiman, fasilitas umum dan jalan, genangan berulang, meningkatnya penyakit dan penurunan akses nelayan serta proteksi ekosistem
Sosial Ekonomi	Lingkungan kumuh, hilangnya lahan tani/perikanan, pendapatan menurun, kemiskinan, pernikahan dini,	Hilangnya lahan produktif, pencemaran, abrasi, penurunan kualitas kehidupan, kesulitan akses	Meningkatnya penyakit menular, kemiskinan berulang, terbatasnya peluang sosial-ekonomi, stasis

Kelompok Isu Besar	Sub Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
	KDRT, sulitnya kerja	kerja, siklus kemiskinan	sosial, dan ancaman kesehatan masyarakat pesisir

5.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Demak ini merupakan langkah operasional yang mengikuti serangkaian analisis mendalam, dimulai dari identifikasi isu-isu strategis hingga penetapan prioritas permasalahan dan tujuan pengelolaan. Proses perumusan rencana kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Partisipasi aktif dari perwakilan pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, akademisi, masyarakat lokal, termasuk, kelompok perempuan, orang muda, serta nelayan kecil memastikan bahwa setiap program yang dirancang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknokratis semata, tetapi juga didasari oleh pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan aktual dan tantangan yang ada di lapangan.

Rencana kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan strategis, menghubungkan kerangka kerja pengelolaan makro yang telah ditetapkan dengan implementasi program yang lebih terperinci dan operasional. Setiap kegiatan di dalamnya dirancang secara spesifik untuk merespons isu-isu yang telah diprioritaskan di tiga pilar utama pembangunan pesisir. Pilar-pilar tersebut mencakup sumber daya pesisir dan ekologi, infrastruktur dan sanitasi, serta sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Melalui pendekatan yang

fokus ini, kebijakan pengelolaan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir sambil menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

Lebih lanjut, penyusunan rencana ini secara eksplisit mengintegrasikan prinsip inklusivitas gender dan sosial sebagai komponen fundamental. Prinsip ini memastikan bahwa akses, partisipasi, dan manfaat dari setiap kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh segmen masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Integrasi ini berlaku pada seluruh fase, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan mengadopsi prinsip ini, pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Demak tidak hanya bertujuan pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan, dan pengurangan kerentanan di antara penduduk pesisir.

Untuk memfasilitasi implementasi dan pengawasan, keseluruhan rencana kegiatan ini disajikan dalam format matriks yang terstruktur. Format matriks ini secara efektif menyajikan keterkaitan logis antara tujuan strategis, kegiatan spesifik, indikator kinerja yang terukur, penanggung jawab pelaksana, lokasi intervensi, dan sumber pendanaan yang jelas. Penyajian yang sistematis ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan transparansi bagi semua *stakeholder*, menyederhanakan mekanisme koordinasi antar-OPD, dan menjadi instrumen utama untuk pemantauan serta evaluasi keberhasilan program di lapangan, sehingga akuntabilitas dapat terjaga.

Tabel 9 Isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Demak

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
Land Subsidence	Mengurangi laju penurunan muka tanah di kawasan pesisir Sayung dan sekitarnya.	Berkurangnya laju penurunan tanah ≤ 5 cm/tahun (dari rata-rata $\approx 10-15$ cm/tahun).	Pengendalian pemanfaatan air tanah dan rekayasa geoteknik.	- Implementasi kebijakan pembatasan izin dan pengetatan pengawasan sumur bor industri. - Pembangunan infrastruktur penyediaan air baku alternatif (misal: SPAM regional). - Injeksi air permukaan atau air baku ke dalam akuifer yang tertekan.	- Penurunan jumlah sumur bor ilegal industri $\geq 50\%$. - Cakupan layanan SPAM regional mencapai target kawasan industri. - Peningkatan tinggi muka air tanah di zona rawan.	Pemerintah Daerah (Pemda), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas ESDM, Industri, Akademisi.	Sayung, Karangtengah (Zona Industri dan Padat Penduduk).		Jangka Menengah (3-5 Tahun)	APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten, Investasi Swasta.
Alat tangkap tidak ramah lingkungan	Menghentikan penggunaan alat-alat tangkap tidak	Hilangnya pelanggaran penggunaan alat tangkap	Menguatkan regulasi penggunaan alat tangkap	Penyusunan regulasi	Penetapan peraturan penggunaan alat tangkap	Pemda (DKP, DLH), Kelompok masyarakat	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah		1- 5 tahun	APBD, APBD Prov, APBN, Program

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
	ramah lingkungan		Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya alat tangkap tidak ramah lingkungan Meyusun kesepakatan bersama/ kerifan lokal penetapan wilayah tangkap Penetapan zona/wilayah tangkap	Pengawasan penggunaan alat tangkap Sosialisasi Penegakan sanksi	Penurunan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan Masyarakat yang mengikuti sos alat tangkap ramah lingkungan Pelanggaran yang ditindaklanjuti	pesisir, Polairud, TNI,	, Bonang, Wedung			CSR/Filantropi, Dana Desa.
Reklamasi	Menurunkan Luas wilayah pesisir terdampak	Berkurangnya luas pesisir yang terlindungi	Pengetatan izin reklamasi	Evaluasi perijinan Inspeksi lapangan	Perijinan reklamasi yang dilakukan evaluasi	Pemkab (Dinutaru, DLH), Pemprov, masyarakat	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah		3- 5 tahun	APBD, APBD Prov, APBN, Program

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
		dampak reklamasi	Pengawasan pelaksanaan reklamasi		Pelaksanaan pengawasan reklamasi	kelompok pesisir,	, Bonang, Wedung			CSR/Filantropi, Dana Desa.
Alih fungsi lahan	Menguatkan penggunaan lahan sesuai fungsinya	Meningkatkan kepatuhan RTRW	Pengendalian pemanfaatan lahan	Pengawasan penggunaan lahan	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Pemkab (Dinputaru, Dinas PKP, Dinperten), Pemprov, masyarakat kelompok pesisir,	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung		1-5 tahun	APBD, APBD Prov, APBN,
Perluasan kawasan industri	Menurunkan dampak negatif kegiatan industri di kawasan pesisir	Meningkatkan penataan kawasan Peruntukan industri	Mengurangi kejadian pencemaran lingkungan oleh industri	Pengawasan kegiatan industri Penegakan sanksi Sosialisasi	Pemantauan Industri yang mematuhi perijinan lingkungan per semester	Pemkab (Dinputaru, DLH, Dinakerind), ATR BPN, Pemprov,	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung		1- 5 tahun	APBD, APBD Prov, APBN,
Degradasi mangrove	Meningkatkan konservasi ekosistem mangrove	Meningkatnya luasan ekosistem	Penyediaan lahan konservasi	Penanaman mangrove Pengembangan usaha pembibitan	Luas mangrove yang ditingkatkan	Pemkab (DLH, Dinas KP), Pemprov, masyarakat kelompok	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah		1- 5 tahun	APBD, APBD Prov, APBN,

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
		mangrove terpelihara	Pengembangan mangrove untuk edukasi dan ekonomi Kolaborasi stakeholder pengelolaan mangrove Penangkapan sedimentasi	Monitoring ekosistem mangrove Pembinaan dan dukungan kelompok pegiat mangrove	Masyarakat/ kelompok yang terlibat dalam pengelolaan mangrove Penurunan emisi Gas rumah kaca sektor lahan (mangrove)/ blue carbon	pesisir, CSR, NGO	, Bonang, Wedung			

Tabel 10 Isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Demak

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
Rob (Banjir Pasang Air Laut)	Melindungi permukiman dan infrastruktur vital dari genangan Rob.	Berkurangnya luas area tergenang Rob $\geq 60\%$. Kerusakan fasilitas publik akibat Rob hilang.	Pembangunan infrastruktur pengaman pesisir terintegrasi (<i>hard structure & nature-based</i>).	1. Pembangunan Tanggul Laut/ <i>Giant Sea Wall</i> atau Sistem Polder Pesisir. 2. Revitalisasi dan Normalisasi saluran drainase primer dan sekunder. 3. Peninggian (elevasi) ruas jalan utama yang tergenang permanen (misal: Pantura Demak).	1. Tanggul/Polder berfungsi penuh dan melindungi zona Permukiman Prioritas. 2. Debit air Rob di saluran drainase berkurang. 3. Ruas jalan utama bebas genangan saat pasang normal.	Pemda, BBWS, Kementerian PUPR, Masyarakat.	Kecamatan Sayung, Morosari, Bedono, Desa-desa terdampak Rob.			APBN (Kementerian PUPR), Pinjaman/ Hibah Internasional, APBD.
Abrasi (Pengikisan Pantai)	Menurunkan laju mundurnya garis pantai dan merehabilitasi lahan yang hilang.	Berkurangnya Laju abrasi menjadi 0 (netral) atau terjadi akresi positif. Luas mangrove	Pengamanan garis pantai berbasis rekayasa (struktur keras) dan ekosistem	1. Pemasangan struktur pengaman pantai keras (misal: Breakwater dan Groyne). 2. Implementasi konsep <i>Hybrid Engineering</i>	1. Garis pantai stabil di lokasi yang dipasang breakwater. 2. Tingkat kelangsungan hidup mangrove $\geq 70\%$.	Pemda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Masyarakat Pesisir/ Kelompok Tani	Pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Kecamatan Wedung			APBN (KKP), APBD, Program CSR/Filantropi, Dana Desa.

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
		direhabilitasi ≥ 1.000 ha.	(struktur lunak).	(penanaman mangrove di belakang <i>breakwater</i>). 3. Rehabilitasi ekosistem mangrove di lahan tambak non-produktif.	3. Sedimentasi lumpur terjadi di depan kawasan yang direhabilitasi.	Tambak, Akademisi.	(Area Abrasi Parah).			
Belum adanya infrastruktur pengaman pesisir	Membangun infrastruktur keras dan lunak yang terencana dan berfungsi sebagai penahan bencana.	Berkurangnya kerusakan fasilitas umum dan akses jalan.	Perencanaan tata ruang terpadu dan investasi infrastruktur jangka panjang.	1. Penyusunan dan pengesahan Masterplan Zonasi dan Kawasan Pesisir yang adaptif terhadap bencana. 2. Pembangunan dan penguatan tanggul/talud penahan Rob di sepanjang pemukiman. 3. Peningkatan kualitas dan elevasi ruas jalan desa yang rusak	1. Dokumen Masterplan disahkan dan terintegrasi dalam RPJMD. 2. Panjang tanggul pengaman sesuai kebutuhan desa terdampak. 3. Ruas jalan vital desa dapat diakses 24 jam.	Pemda (Bappeda), DPRD, Dinas PU, Kementerian/ Lembaga terkait, Masyarakat.	Seluruh Wilayah Pesisir Demak.			APBD Kabupaten/ Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Infrastruktur.

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
				permanen akibat Rob.						
Air bersih minim Sumber air: baku sulit (karena pdam belum masuk sayung) ambil air dari bawah tanah. debit air kecil, peninggian jalan pipa tertutup sehingga perlu pembangunan jaringan)	Meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum Tersedianya air baku yang bersih yang dapat diakses oleh semua pihak dengan berkelanjutan Masyarakat memiliki akses terhadap air bersih	Pembangunan sarpras (SPAM) dan optimalisasi SPAM yang sudah ada	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Penyediaan air bersih melalui SPAM regional melalui PDAM Optimalisasi PAMSIMAS/SPAM Desa yang sudah ada	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum Setiap keluarga memiliki akses terhadap air bersih (1 KK=1 SR) Jumlah SPAM yang ada di setiap rumah warga dapat beroperasi dengan baik	PDAM, Dinputaru, Dinpermasdes, Pemerintah Desa	Seluruh desa di wilayah pesisir Demak		1- 5 tahun	APBD, APBN, Investasi/ Business to business, CSR

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
Sanitasi dan Limbah: masih ada yang belum memiliki septic tank yang sesuai dengan standart (masih memakai cubluk), tangki septic terkena rob, perlu diperbarui, perlu sedot tinja berkala (kesadaran masyarakat masih rendah.	Meningkatkan infrastruktur sanitasi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP) Meningkatkan akses masyarkat terhadap air sanitasi yang layak	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi yang layak, inklusif, dan berkelanjutan melalui perencanaan terpadu, peningkatan layanan dasar, serta kolaborasi lintas sektor.	Program Pengelolaan Dan Pengembang Dan Sistem Air Limbah Layanan sedot tinja yang disediakan oleh pemerintah Sosialisasi layanan sedot tinja Peningkatan sarpras sedot tinja dan IPLT (Instalasi pengolahan lumpur tinja) Pembangunan tanki septic bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak Jumlah masyarakat melakukan penyedotan tinja secara berkala (3-5 tahun sekali) Persentase prasarana IPLT berfungsi dengan baik Jumlah keluarga memiliki 1 tangki septic yang sesuai standard	Dinputaru, Pempdes	Seluruh desa di wilayah pesisir Demak		3- 5 tahun	APBD, APBN, CSR
Sampah Timbunan sampah di hilir	Meminimalisa-si pencemaran di darat,	Berkurangnya timbunan sampah di hilir	Meningkatkan koordinasi lintas wilayah	Pembuatan TPS3R di tingkat desa di Sayung (pengelolaan	Adanya TPS3R masing-masing 1 di setiap kecamatan (jangka pendek) 1	DLH,Swasta, PU	Seluruh kecamatan di			APBN, APBD, CSR

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
akibat pembuangan sampah sembarangan di daerah hulu yang mengakibatkan rusaknya Pantai Istanbul Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah Sarpras pengelolaan sampah minim	udara, dan air melalui pengelolaan sampah dan limbah yang terkendali guna menurunkan risiko penyakit bagi masyarakat.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan terkait pengelolaan sampah dan limbah	dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan serta pembuangan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.	menggunakan metode TPS3R) Sosialisasi di daerah pesisir dengan pengembangan bank sampah Mengoptimalkan TPS3R di desa	TPS3R di setiap desa (jangka panjang) Persentase TPS3R yang beroperasi dengan baik Persentase tempat pembuangan sampah liar		wilayah pesisir Demak			
Drainase pemukiman warga yang	Meningkatkan kualitas dan	Meningkatnya Persentase drainase	Meningkatkan kinerja drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (Pembangunan,	Persentase drainase perkotaan yang tertangani	Dinptar, Perkim, Bapermas,	Pemukiman warga dan pesisir			APBD

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
sudah tidak layak	daya tampung drainase	dalam kondisi baik		Penataan dan pemeliharaan drainase)		Pemdes, Dinkes,				
Akses buruk Akses jalan antar-des a pesisir yang rusak akibat tergenang rob	Meningkatkan kualitas layanan jalan dan jembatan	Meningkatnya Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyeleng garaan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi mantap (KM)	Dinputaru	Sayung, Karangtengah (Pesisir)			
Hunian yang tidak layak/kumuh (dan khususnya akibat landsubsidence dan rob)	Meningkatkan pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni	Meningkatnya Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Pengembangan permukiman layak huni Kolaborasi dengan BPD (Bank Jateng) untuk pembiayaan rumah apung	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Persentase berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh.	Dinputaru, Perkim Provinsi, CSR (Bank Jateng),	Pemukiman pesisir Demak Timbulsloko (Sayung)		2025-2027	APBD dan dana CSR

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
				Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Pembangunan rumah apung	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana Persentase perumahan yang dilengkapi PSU Data jumlah rumah apung yang sudah dibangun (target: 100 rumah)					
Banyaknya bangunan liar yang tidak berizin serta melanggar aturan di sepanjang sempadan dan di atas sungai sehingga	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih optimal	Meningkatnya kepatuhan penataan ruang	Meningkatkan kualitas penataan ruang melalui penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Operasi pemeliharaan sungai Sosialisasi kepada masyarakat	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Persentase jumlah bangunan liar di sepanjang dan di atas sungai yang berkurang	Dinputaru, Satpol PP	Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung (Desa Tridonorejo, Purworejo, Gebang)			APBD

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
menyebabkan aliran sungai tersumbat (banjir)	dan berfungsi secara ekologis.		daerah aliran sungai agar berfungsi optimal secara ekologis dan berkelanjutan.	Penertiban bangunan liar di sempadan dan di atas sungai						
Belum ada masterplan dan pemetaan mangrove	Meningkatkan upaya penagaan ekosistem mangrove serta perlindungan ekosistem pesisir	Tersedianya masterplan pengelolaan mangrove Tersedianya data jumlah mangrove yang survive (yang berhasil hidup dari program penanaman)	Penyusunan dokumen panduan/ skema penanaman dan monitoring mangrove Pembangunan infrastruktur pelindung	Program Monitoring dan evaluasi mangrove yang sudah ditanam Program penanaman mangrove di Pesisir Demak	Adanya data mengenai persentase/jumlah survival rate mangrove yang ditanam	DLHK Provinsi, Kementerian LH, DKP, KKP, Kemenhut, CSR	Pesisir Demak		3-5 tahun	APBN, APBD, CSR

Tabel 11 Isu sosial ekonomi Kabupaten Demak

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
Rob (Banjir Pasang Air Laut)	Melindungi permukiman dan memulihkan aksesibilitas vital dari genangan Rob.	Frekuensi genangan Rob di zona kritis berkurang $\geq 70\%$. Kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum menurun.	Pembangunan infrastruktur pengamanan permanen dan tata kelola air.	1. Membangun Tanggul Laut/Polder Pesisir di wilayah terdampak parah (misal: Sayung). 2. Meningkatkan (elevasi) dan merehabilitasi ruas Akses Jalan Rusak (Nilai 5) di jalur utama. 3. Mengaktifkan sistem drainase dan pompa air saat pasang tertinggi.	1. Area yang dilindungi tanggul bebas genangan Rob 2. Akses jalan dapat dilalui kendaraan 24 jam. 3. Waktu surut genangan lebih cepat ≤ 3 jam.	Kementerian PUPR, BBWS, Pemda (Dinas PU, BPBD), Masyarakat .	Kecamatan Sayung, Morosari, Ruas Jalan Pantura Demak.		Jangka Menengah (3-5 Tahun)	APBN (PUPR), Pinjaman/ Hibah Internasional.
Abrasi (Pengikisan Pantai)	Menghentikan laju Abrasi dan merehabilitasi lahan pesisir untuk memulihkan	Garis pantai menjadi stabil atau terjadi akresi. Luas lahan produktif (Hilangnya Lahan)	<i>Hybrid Engineering</i> dan restorasi ekosistem (berbasis alam).	1. Memasang <i>Breakwater</i> (pemecah gelombang) offshore dan groin untuk menahan energi gelombang.	1. Sedimentasi lumpur terkumpul di zona penanaman mangrove.	Kementerian KKP, Pemda, Kelompok Tani Tambak, LSM	Pesisir Kecamatan Sayung, Bonang, Karang-tengah (Area Abrasi).		Jangka Panjang (5-10 Tahun)	APBN (KKP), Dana Desa, CSR Perusahaan, Skema Climate Finance.

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
	ekosistem dan ekonomi.	yang direhabilitasi mencapai target.		2. Merehabilitasi hutan mangrove secara masif (setelah breakwater) di kawasan lahan tambak yang hilang. 3. Pelatihan budidaya perikanan yang adaptif (misal: silvofishery).	2. Kelangsungan hidup mangrove $\geq 70\%$. 3. Tingkat Penghasilan masyarakat menurun (Nilai 5) kembali normal $\geq 80\%$.	Lingkung-an.				
Pencemaran Limbah	Menurunkan pencemaran lingkungan dan mengurangi risiko Ardenus Penyakit Menular (Nilai 5).	Menurunnya tingkat kontaminasi bakteri/limbah di air sumur/permukaan menurun. Kasus penyakit menular (DBD, kulit) menurun $\geq 50\%$.	Peningkatan sistem sanitasi terpusat dan tata kelola persampahan.	1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di kawasan padat penduduk. 2. Perbaikan dan pembangunan sanitasi layak (MCK) dan sistem persampahan yang terpusat.	1. Jumlah rumah yang terhubung ke IPAL komunal meningkat. 2. Volume sampah terkelola di TPA/TPS terpusat meningkat $\geq 60\%$. 3. Angka kasus endemik penyakit menular	Pemda (Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup), Kementerian Kesehatan, Masyarakat, Puskesmas.	Wilayah terdampak Rob dan padat penduduk (Kawasan Lingkungan Kumuh).		Jangka Pendek & Menengah (1-3 Tahun)	APBD Kabupaten/ Provinsi, DAK (Kesehatan dan Sanitasi), Bantuan Lembaga Donor.

Isu Permasalahan	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran (Rupiah)	Periode	Sumber Pendanaan
				3. Melaksanakan kampanye dan layanan kesehatan gratis untuk pencegahan Penyakit Menular.	(misal:DBD) turun signifikan.					



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

1. Berbasis Kinerja (SMART):

Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Setiap indikator keberhasilan harus dirumuskan secara jelas, terukur secara kuantitatif, realistis dalam pencapaiannya, relevan dengan tujuan program, dan memiliki kerangka waktu implementasi yang pasti, sehingga memudahkan penentuan capaian dan *output* program.

2. Inklusivitas dan Responsivitas Sosial:

Proses pemantauan dijamin bersifat inklusif, memastikan partisipasi dan representasi penuh dari kelompok rentan dan marjinal, termasuk perempuan, orang muda, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Masukan dan perspektif mereka harus diintegrasikan dalam evaluasi akhir, sehingga menjamin bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik:

Mekanisme pemantauan dilaksanakan secara terbuka (*open governance*), melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah dan OPD teknis hingga akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Proses ini menuntut pelaporan yang mudah diakses oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas kinerja program.

4. Siklus Berkala dan Keterpaduan Jangka Panjang:

Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemantauan tahunan untuk koreksi jangka pendek dan evaluasi komprehensif setiap lima tahun (sesuai siklus RPJMD dan RPJPD). Pendekatan ini memastikan bahwa program selalu relevan, adaptif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

6.2. Komponen Pemantauan dan Evaluasi

1. Kinerja Indikator Keberhasilan

Secara spesifik untuk setiap tujuan pengelolaan dan kegiatan program. Indikator ini dirancang untuk memastikan capaian program dapat diverifikasi secara empiris. Misalnya, keberhasilan ekologis diukur melalui luas area mangrove yang berhasil direhabilitasi dan berkurangnya garis pantai yang terdampak abrasi. Sementara itu, capaian sosial-ekonomi diukur melalui peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Selain itu, komitmen terhadap keadilan dievaluasi melalui persentase partisipasi kelompok rentan dalam forum pengambilan keputusan, menjamin bahwa manfaat program tidak hanya bersifat teknis tetapi juga inklusif.

2. Pelibatan Pihak

Dalam pemantauan dan evaluasi dirancang untuk bersifat multi-sektor dan inklusif. Proses ini melibatkan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait (seperti DLH, Disputaru, Dinperkim, dan Bapperida), aparat desa, lembaga konservasi, serta perguruan tinggi. Partisipasi juga diperluas kepada organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat pesisir. Keterlibatan ini secara khusus menjamin partisipasi aktif perempuan, orang muda,



penyandang disabilitas, dan kelompok marginal di setiap tahapan, baik sebagai penyedia data, pemantau independen, maupun evaluator partisipatif, untuk memastikan akuntabilitas sosial.

3. Tata Waktu Pelaksanaan

Pemantauan dan evaluasi program disusun dalam siklus yang berkala. Pemantauan rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk mengukur progres pencapaian kegiatan dan mengidentifikasi penyesuaian yang diperlukan secara cepat. Sementara itu, evaluasi komprehensif dijadwalkan pada pertengahan periode (*mid-term review*) dan akhir periode (*end-term review*), selaras dengan siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi ini dikompilasi dalam laporan resmi yang transparan, menjadi dasar utama untuk perbaikan kebijakan, dan wajib disajikan dalam forum konsultasi publik untuk menerima masukan langsung dari masyarakat.

6.3. Rencana Pemantauan dan Evaluasi Per Tujuan

Rencana pemantauan dan evaluasi dalam dokumen Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Demak ini dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan hasil analisis isu strategis, perumusan tujuan pengelolaan, serta strategi dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memastikan keterhubungan yang jelas antara permasalahan, tujuan, dan tindakan yang dilakukan, rencana pemantauan dituangkan dalam sebuah matriks pemantauan.





Supported by
 **Norway**